



WRM Bulletin 241
World Rainforest Movement
Desember 2018

Suara dari Akar Rumput: Komunitas dalam Strategi Pergerakan dan Perlawanan



Artikel-artikel dalam Buletin ini ditulis oleh organisasi-organisasi dan individu-individu berikut yaitu : aktivis pribumi dari Brasil; aktivis dari Sierra Leone; organisasi Kalpavriksh dan Amhi Amchi Arogyasaathi dari India; Program Perempuan dan Wilayah dari Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe; aktivis dari Kamerun; jaringan Wanita Afrika Menentang Ekstraksi Sumberdaya yang Merusak (WoMin Alliance); Ambiental Justiça! dari Mozambik dan SUHODE Foundation dari Tanzania.

Suara dari Akar Rumput: Komunitas dalam Strategi Pergerakan dan Perlawanan

Sudut pandang organisasi

Bagaimana cara Memperkuat Gerakan Perlawanan?

Meskipun ada banyak kerusakan sangat besar yang disebabkan oleh perindustrian pada hutan-hutan dunia, industri-industri ini juga memunculkan sesuatu yang lain yaitu gerakan perlawanan yang kuat dan beragam dari komunitas-komunitas yang terkena dampak dalam upaya mempertahankan wilayah, mata pencaharian, budaya, dan bahkan keberadaan mereka. Perjuangan terus berlanjut!

Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan terus dihancurkan dengan sangat cepat. Ribuan hektar dihancurkan untuk membuat jalan bagi proyek-proyek pertambangan, ekstraksi minyak atau gas, perkebunan industri seperti kayu putih atau kelapa sawit, bendungan, konsesi penebangan dan proyek mega-infrastruktur, serta banyak kegiatan lainnya.

Akan tetapi di samping banyaknya kerusakan besar yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan ini di seluruh dunia, kerusakan ini juga menyebabkan munculnya sesuatu yang lain yakni **gerakan perlawanan yang kuat dan beragam dari komunitas yang terkena dampak dalam upaya mempertahankan wilayah, mata pencaharian, budaya dan kepercayaan mereka, dan bahkan keberadaan mereka.**

Meskipun terdapat kriminalisasi dan kekerasan yang parah dari pihak korporasi (perusahaan) dan pemerintah serta lembaga keuangan "pembangunan" dan lembaga keuangan lainnya untuk melanjutkan bisnis yang memungkinkan kegiatan yang berbahaya ini,; masyarakat dan komunitas tidak berhenti memobilisasi, mengorganisasikan, mengkoordinasi, dan menentang serangan yang menggunakan topeng "pembangunan". Mereka meyakini bahwa tanpa perjuangan ini, hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah mereka akan dihancurkan dalam skala yang lebih besar.

Buletin ini merupakan refleksi dari beragam gerakan perlawanan dan tantangan besar yang ada saat ini, dan pada masa yang akan datang. Kami bertanya pada diri

sendiri: **bagaimana gerakan perlawanan dan organisasi di tingkat akar rumput dapat diperkuat untuk menghentikan perusakan hutan dan masyarakat dalam konteks global saat ini?**

Wawancara dengan *Kum'Tum* dari orang-orang *Akroá-Gamela*, yang berlokasi di pintu gerbang Amazon Brasil, telah membawa kita ke dalam proses pribadi dan kolektif di mana **memulihkan ingatan dan suara masyarakat adalah kunci untuk kembali terhubung dengan tanah leluhur untuk merebut kembali tanah yang menjadi sumber kehidupan**. “Kami tidak mengklaim tanah tersebut hanya untuk produksi. Kami mengklaim kembali tanah itu karena tanah tersebut adalah tempat suci; Tanah ini adalah tempat yang memberi makna bagi keberadaan kita, ”Kum'Tum mengingatkan

Dari **Sierra Leone** muncul kisah tentang sebuah komunitas di Port Loko, di mana — setelah hampir sepuluh tahun berjuang melawan perusahaan yang merampas tanah mereka melalui tipu daya dan mengisinya dengan perkebunan kelapa sawit — pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat. Proses koordinasi di antara organisasi lokal, regional dan internasional tampaknya sangat penting dalam mendukung perjuangan ini. Sekarang mereka mencoba untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan dengan sebidang tanah luas yang dipenuhi barisan pohon kelapa sawit.

Dari **India**, sebuah artikel mengeksplorasi beragam bentuk penemuan dan pembaharuan kembali organisasi akar rumput di Korchi, Maharashtra. Dengan penekanan khusus pada perempuan secara kolektif, artikel tersebut menyoroti **bagaimana perempuan membuat suara mereka dapat didengar — tidak hanya untuk menentang pertambangan tetapi juga dalam bentuk keterlibatan dalam pengambilan setiap keputusan di tingkat desa dan antar desa**. Perkumpulan perempuan ini mengembangkan strategi hutan dengan kontrol lokal agar dapat menghidupkan kembali identitas budaya mereka, menegaskan demokrasi langsung dan demokrasi gender dan mempertanyakan contoh pembangunan yang ada, dan banyak tindakan-tindakan lainnya.

Dari **Amerika Latin**, artikel lain mencerminkan berbagai **serangan terhadap perempuan dalam mempertahankan wilayah**. Artikel ini menggambarkan beragam capaian para perempuan yang memungkinkan mereka untuk memosisikan perspektif unik mereka, dan bagaimana pada banyak kesempatan mereka berhasil menghentikan sementara atau melumpuhkan kegiatan ekstraktif (pengambilan

bahan baku langsung dari alam). Mereka menggarisbawahi **proses penyembuhan adalah hal yang mendasar dalam setiap dialog pengetahuan di antara masyarakat, kondisi dan generasi — dan ini merupakan pemulihan nama baik terhadap leluhur perempuan.**

Buletin ini juga menyertakan wawancara dengan seorang aktivis dan pembela hak asasi manusia dari Kamerun, Nasako Besingi. Dalam wawancara ini, Besingi mengajak kita untuk merenungkan apa artinya, tanah “milik Negara” dalam undang-undang sebagian besar negara-negara di Afrika.” **la juga mengarahkan kita kepada strategi dan tantangan penting dalam membangun gerakan yang kuat.** “Memperkuat solidaritas di antara masyarakat dan pertukaran gagasan antar masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh proyek-proyek pembangunan — membangun kepercayaan di tingkat masyarakat — adalah tulang punggung dari perlawanan yang membuahkan hasil,” katanya.

Dari **Afrika Selatan**, sebuah artikel memberi tahu kami tentang **the Permanent Peoples Tribunal (Pengadilan Masyarakat Pribumi)**, sebuah tempat di mana lebih dari dua puluh kasus dari wilayah tersebut dipublikasikan. Tribunal telah **menjadi sebuah tempat penting bagi masyarakat setempat untuk saling berbagi tentang perjuangan yang mereka alami dalam rangka membangun solidaritas.** Kasus komunitas Xolobeni di Afrika Selatan merupakan sebuah simbol. Setelah 16 tahun berjuang melawan konglomerat pertambangan Australia, pada November 2018, pengadilan memutuskan berpihak dan mendukung masyarakat; hal ini menunjukkan bahwa, sebelum pemberian hak penambangan, perusahaan harus memperoleh persetujuan “penuh dan resmi” dari masyarakat dan pemerintah kota Xolobeni.

Artikel lain berbagi cerita tentang perusahaan perkebunan, **Green Resources, di Tanzania.** Dari artikel ini kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini harus mendapatkan akses ke area tanah yang luas, dan untuk itu, mereka membuat serangkaian janji palsu yang kecil kemungkinan untuk dipenuhi untuk meyakinkan masyarakat agar menyerahkan tanah mereka. Namun demikian, komunitas Nzivi mempelajari tentang pengalaman-pengalaman ini tepat waktu dan memutuskan untuk mengatakan tidak kepada perusahaan mana pun yang ingin mengendalikan bagian penting dari tanah mereka. Artikel ini juga menyoroti pentingnya berbagi cerita dan pengalaman di antara komunitas yang menghadapi situasi serupa.

Perjuangan Terus Berlanjut!

Brasil: Saya Kum'tum, Saya Bagian dari Masyarakat Akroá-Gamela

WRM berbicara dengan Kum'tum, seorang lelaki pribumi dari orang-orang Akroá-Gamela di Brasil. Artikel ini merupakan renungannya tentang sejarah masyarakat ini dan proses kolektif saat ini yang bertujuan untuk menemukan kembali dan memulihkan akar mereka setelah direbut dari wilayah dan komunitas mereka.

Menurut peta dan informasi dari abad ke-18, orang-orang Gamela, sebuah istilah yang digunakan orang Portugis, tinggal di Maranhão di wilayah Baixo Pindaré — yang mencakup kotamadya Codó, Monção, Cajari, Viana, dan Penalva. Nenek saya lahir dan besar di desa Capibari di Penalva; dan ibu saya lahir di Monção, di tempat bernama Jacareí, tempat di mana saya juga dilahirkan. Daerah ini adalah wilayah besar yang, dan masih, dihuni oleh orang-orang Akroá-Gamela.

Saya adalah hasil dari proses kekerasan dan penjajahan. Ketika nenek saya masih sangat muda, nenek saya diambil dari desa oleh keluarga kulit putih dari kota. Ibu saya lahir jauh dari desa. Saya juga dilahirkan jauh dari desa. Dan **karena di dalam tubuh dan –khususnya- jiwa saya terdapat tanda-tanda leluhur**, maka pada suatu masa, saya mulai bertanya-tanya tentang tanda-tanda yang saya miliki. Dari proses pencarian, yang saya sebut pengembalian kesadaran, saya membuat keputusan untuk berhubungan kembali dengan akar leluhur itu, untuk memahami tanda-tanda yang ada pada tubuh dan jiwa saya. Pencarian ini bukanlah pencarian secara individu, melainkan selalu secara bersama-sama. Kami menemukan bahwa kami tidak sendirian di dunia, dan bahwa tanda-tanda ini bukan tanda-tanda individu; tanda-tanda ini adalah tanda-tanda orang dengan akar yang sama.

Untuk waktu yang lama, nenek dan ibu saya menggunakan strategi diam. Dalam menghadapi penolakan Negara terhadap leluhur kami, keputusan yang tepat saat itu adalah diam. Dari bahan bacaan saya, hari ini saya menyadari bahwa sesungguhnya diam adalah bentuk perlawanan. Saat ini adalah waktu di mana kita harus diam agar dapat terus hidup. Jadi, bertentangan dengan apa yang orang dengar, diam tidak berarti menyetujui kekerasan Negara. Bagi masyarakat adat kami, diam adalah — secara umum — sebuah strategi perlawanan. **Memahami dan merasakan mengapa orang melakukan satu dan lain hal hanya mungkin dilakukan ketika seseorang mengakses memori kolektif.**

Kakek-nenek kami mengatakan bahwa hari ini kami berada di Taquaritiua, yang merupakan tempat yang menjadi tujuan masyarakat adat. Masyarakat adat akan datang dari hutan hujan, khususnya mulai Agustus. Akan tetapi kegiatan ini terhenti disebabkan oleh program pemasangan saluran transmisi telegraf yang mulai memecah wilayah itu. Dan pada 1960-an, proses kekerasan "grillaje" (perampasan tanah), berasal dari dokumen-dokumen notaris yang curang terjadi. **Tujuan dari semua kekerasan ini adalah untuk meniadakan nenek moyang yang berakar di tanah adat tersebut.** Keberadaan kami sebagai sebuah masyarakat adat yang menjadi bagian dari negara ini ditiadakan.

Negasi atau penolakan itu mulai menciptakan pemisahan. Sebuah pemisahan dari tanah secara keseluruhan mulai dari orang-orang, hutan, air, sungai, bahkan tempat-tempat suci. Begitu pagar dipasang, orang-orang juga mulai berpisah satu sama lain; batas dan pemisah yang ditempatkan di antara orang-orang ini mengakibatkan terputusnya hubungan antar manusia. Ketika kita berupaya melakukan tindakan, penyelamatan, dan penyambungan kembali dengan ingatan leluhur kita, perspektif itu akan dimungkinkan jika kita terhubung kembali dengan tempat-tempat yang memberi makna bagi keberadaan kita. Kedua hal ini selalu terkait erat satu sama lain, **Rujukan ke tempat-tempat ini — bahkan yang masih dipagari — adalah karena tempat-tempat tersebut memberi makna bagi keberadaan kita sebagai manusia.** Itulah tujuan dari mengakses memori, sebuah proses yang terjadi di dalam hati yang hanya mungkin dibangun, dibangkitkan kembali, jika itu terjadi di dalam hati.

Reklamasi Sejarah, Wilayah dan Lahan

Dokumen-dokumen muncul tentang sumbangan [tanah] yang diberikan kepada [kepada masyarakat adat] pada masa kolonial, di tahun 1759; yang merupakan paradoks karena kami diberi sesuatu yang sudah menjadi milik kami. Sekarang saya berbicara secara khusus tentang salah satu tanah tersebut: Taquaritiua, yang berada di kotamadya Viana. Dokumen-dokumen dari 1759 menyatakan tentang sumbangan lahan sekitar 14 atau 15 ribu hektar. Dan hal tersebut lebih tepat jika disebut sebuah perampasan.

Pada tahun 1969, hukum pertanahan Sarney (1) membuat lahan publik yang tersedia untuk diambil alih, dan pada tahun 1970-an, Maranhão mengalami proses kekerasan "pembakaran" (perampasan tanah). Pada tahun 1970-an dan 1980-an, kami hidup melalui proses di mana wilayah yang disumbangkan pada 1759 dipartisi

dan dipagari. Hasilnya adalah bahwa sekarang pada tahun 2018, semua tanah yang muncul dalam akta dari abad ke-18 terdaftar atas nama individu-individu dalam daftar kota Viana.

Namun pada akhir 1990-an, gerakan internal "*rumo*" dimulai di daerah-daerah yang telah direbut untuk menjamin kelangsungan hidup. "Rumo" adalah ketika anggota keluarga Anda pergi bekerja pada sebidang tanah di daerah-daerah yang telah terdaftar atas nama orang lain. Sebuah proses lama untuk pemulihan lahan. Ada banyak tekanan untuk mengusir keluarga yang berusaha memulihkan tanah mereka. Keputusan kemudian dibuat: "Tidak, mulai sekarang, penjajah tidak akan memasang pagar lagi; kita yang akan membatasi petak-petak itu." Perlawanan ini sangat penting bagi kelangsungan rakyat, bahkan jika itu berada di sebidang tanah yang sangat kecil sekalipun. Keluarga-keluarga lain diusir dan mereka pergi ke kota yang membuat masyarakat adat berpencar. **Akan tetapi proses reklamasi teritorial yang lebih baru dimungkinkan karena ada kekuatan yang lebih besar di balik gerakan ini.**

Pada tahun 2015 kami memutuskan untuk mereklamasi beberapa bidang tanah, khususnya yang ada di sekitar dan sangat dekat dengan rumah-rumah, untuk menjamin tempat bertani. Tetapi ada elemen untuk proses pemulihan ini yang lebih mendasar bagi kami, hal ini kembali ke ingatan kami yaitu merebut kembali tempat-tempat suci. **Kami tidak mengklaim tanah hanya untuk tujuan produksi namun kami mengklaim kembali tanah itu karena itu adalah tempat suci yakni sebuah tempat yang memberi makna bagi keberadaan kita.**

Hal yang lebih penting adalah ketika kami memutuskan untuk mengatur kembali dan memberi tahu dunia bahwa kami ada sebagai manusia. Inilah yang saya katakan sebelumnya: ada waktu untuk diam, dan ada juga waktu untuk berbicara. Sekarang kita ada dalam masa di mana itu perlu — dan terus diperlukan — untuk berbicara agar kita terus ada.

Organisasi, Kebencian, dan Kekerasan

Sejak awal, kami ingin organisasi kami bersifat sirkular atau melingkar. Tidak ada satu sosok yang menjadi juru bicara karena suara itu haruslah dari komunitas. **Kita harus terus membangun proses pembicaraan yang berkelanjutan di antara kita sendiri untuk mengambil keputusan.** Ini adalah proses perancangan permanen dimana masyarakat membangun perjanjian di antara mereka sendiri; dan sekali lagi, ini didasarkan pada apa yang dikatakan oleh para tetua tentang bagaimana kita

selalu mengatur diri — yang untuk sementara waktu dibungkam, agar terus ada. Tapi nilai ini tidak hilang, dan kami terus berkata, "Ini selalu menjadi cara kami."

Pada tahun 2014, kami mulai mendapat ancaman karena keputusan reorganisasi kami sebagai manusia. Tahun itu, perusahaan energi Maranhão, Cemar, mulai membangun saluran transmisi listrik baru. Kami meminta mereka untuk menunda pembangunan untuk mengatur situasi dengan lembaga lingkungan. Perusahaan Cemar membangun wacana seolah-olah bahwa "orang-orang pribumi yang diduga" menghalangi pembangunan daerah. Sungguh luar biasa bahwa banyak anggota masyarakat yang sepakat gagasan ini tidak akan membuat masyarakat mendapat manfaat dari apa yang mereka sebut pengembangan; tetapi perusahaan ini masih mengatakan bahwa kami lah dalang yang dibalik penolakan ini.

Pada bulan April 2017, dalam sebuah wawancara dengan radio lokal, wakil [federal] Aluísio Mendes menyebut kami "orang-orang masyarakat adat," adalah perusuh dan penjajah, dan mengatakan bahwa kami merampok orang-orang yang tertib kedamaian dan ketenangan. Mereka mengadakan apa yang mereka sebut sebagai "aksi damai," tetapi kami sekarang tahu bahwa sejak awal, ini adalah tindakan untuk mempersiapkan serangan terhadap gerakan reklamasi tanah yang kami perjuangkan. Mereka pun menyerang. (2) Partisipasi para pemimpin gereja Majelis Allah dalam proses penyerangan ini adalah faktor penting lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mengorganisir aksi di wilayah itu, dan — lebih dari mengorganisir — mereka menyebarkan wacana [tentang] kami sebagai "penjajah yang mengancam perdamaian dan ketertiban." Semua ini dilakukan untuk meletakkan dasar untuk menyerang kami. Di radio, orang mengatakan bahwa "serangan" yang kami lakukan telah menyebabkan beberapa orang lanjut usia meninggal dan beberapa wanita menderita aborsi. Jadi itu seperti bubuk mesiu dan api yang menyulut kebencian bagi mereka untuk menyerang kita. Seperti yang Anda dapat membayangkan, mereka mulai menyalahkan kami atas kematian orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan situasi ini. Iklim pemberontakan dan kebencian dibentuk untuk melawan kami.

Komunitas Terorganisir

Dalam Struktur Masyarakat Tradisional dan Komunitas Maranhão (Fabric of Traditional Peoples and Communities of Maranhão), kami sudah memiliki kelompok-kelompok masyarakat adat, yang meliputi quilombolas, penghuni tepi sungai, nelayan, pemotong kelapa dan petani, yang mendapatkan dukungan entitas negara.

Semua ini dimulai pada tahun 2011, ketika gerakan Moquibom quilombola menduduki INCRA (Institut Nasional Kolonisasi dan Reformasi Agraria) karena kekerasan, dan dari 400+ komunitas quilombola yang dihadirkan untuk diproses di hadapan organisasi ini — belum pernah dilakukan tindakan (3) .

Pada tanggal 30 Oktober 2010, Flaviano, seorang pemimpin quilombola dari Charco, dibunuh. Jaksa Penuntut Umum mengajukan pengaduan terhadap pemilik tanah, perantara dan orang-orang bersenjata. Kami melihat ini sebagai pesan yang sangat jelas untuk semua gerakan quilombola yang muncul. Pada bulan Juni, ada perkemahan sebagai aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Maranhão karena habeas corpus yang diberikan kepada pemilik tanah yang dianggap bersalah atas pembunuhan Flaviano. Perkemahan itu kemudian pindah ke INCRA, karena kami meyakini bahwa kelumpuhan dalam proses demarkasi tanah quilombola menyebabkan terjadinya kekerasan dan ancaman kematian.

Di tahun yang sama, lebih dari tujuh puluh pemimpin di Maranhão menerima ancaman pembunuhan. Kami percaya bahwa **mustahil untuk menyelesaikan ancaman dan kekerasan fisik tanpa menyelesaikan masalah pertanahan**. Pendudukan kantor INCRA itu berlangsung dua belas hari dan kami menemukan diri kami di quilombolas dan masyarakat adat, dan masyarakat adat dan quilombolas; dan kami merasa bahwa terdapat kesamaan yaitu: **perjuangan untuk wilayah yang didorong oleh perasaan memiliki**. Pendudukan berikutnya terjadi, dan pada bulan November 2013 kami mengadakan pertemuan di Santa Helena, di mana tujuh orang Maranhão dan banyak anggota komunitas quilombola berkumpul. Berangkat dari kegiatan ini, kami merasa bahwa “kami harus meresmikan persekutuan” ini. Ini adalah sebuah keputusan bagus dan kami menggunakan simbol bahwa satu batang mudah patah, tetapi jika banyak batang dikumpulkan bersama, sulit untuk mematahkannya. Simbol ini terus menjadi simbol kesediaan untuk terus bersatu dalam perjuangan untuk merebut kembali wilayah kami.

Kami ingin wilayah yang cuma-cuma. Untuk ini, kami perlu membebaskan lahan dan menghilangkan pagar yang menutupi lahan tersebut. Akan tetapi ada pagar lain yang terlihat yang menutupi tubuh kita. Sehingga kami harus **membebaskan bumi dan tubuh kami**. Hal ini dikarenakan bahwa **kami melihat tubuh sebagai simpul hubungan antara diri kita dan tanah, air, tanaman, dan bahkan serangga**. Di tempat lain, proses ini dikenal dengan proses dekolonisasi. Ketika orang merasakan

energi dari tanah asal mereka, energi itu dapat mencapai hati sebagai energi penggerak untuk membebaskan mereka.

The Fabric adalah sebuah proyek aliansi di mana di dalamnya kami menjalankan perjuangan. Perspektif yang kami anut adalah bukan tentang apa yang orang lain akan lakukan untuk kami karena ini bukanlah berupa organisasi terkait atau sekutu; juga bukan berbentuk negara. The Fabric adalah diri dalam diri kita sendiri. Dan yang paling penting, elemen-elemen memori terhadap tanah leluhur itu sangat penting. Ketika kami merobohkan pagar kawat berduri, kami merobohkannya karena pagar tersebut tidak pernah ada sebelumnya melainkan karena ada pihak-pihak yang memasangnya disana. **Ketika kami berbicara tentang merobohkan pagar di dalam diri, kami berbicara tentang merobohkan segala prasangka, rasisme, kekerasan dan patriarki.** Dari tanah leluhur ini, dari harapan akan hubungan kembali dengan energi tanah ini, kami harus melakukan perjuangan.

Kami juga meyakini bahwa tidak ada ruang untuk gagasan kepemilikan tanah secara pribadi - baik itu besar, sedang, kecil atau sangat kecil. Seseorang tidak dapat membagi juçaral menjadi banyak (4). Juçaral adalah ruang untuk penggunaan umum. **Membagi tanah menjadi banyak, pada dasarnya, berarti mereproduksinya dalam skala mentalitas yang sangat kecil bahwa bumi bisa seperti benda, benda yang nantinya bisa saya jual. Sementara seharusnya bumi bukanlah milik kita. Kitalah yang menjadi milik bumi.** Dan dalam hubungan kepemilikan inilah keberadaan kita masuk akal.

Mari kita bicara tentang metodologi The Fabric: Pertemuan atau rapat bukan berarti semua orang ada mengelilingi meja untuk membahas masalah, sepenting apa pun itu. The Fabric seharusnya menjadi ruang di mana orang dapat berbicara di mana setiap orang mendapatkan jumlah waktu untuk berbicara tentang pengalaman mereka, keberadaan mereka. Adapun kegiatan menari, bernyanyi, drum, maracas — semua ini adalah bagian dari apa yang kita sebut konten bukan aksesori. Itu adalah bagian dari konten yang menyatukan seluruh elemen di The Fabric.

Jika gerakan kami tidak berangkat dari perasaan dari nenek moyang kita sendiri, semua perjuangan itu akan selalu berakhir dengan kekerasan. Pemerintah yang tidak menghormati leluhur ini adalah pemerintah yang kejam — baik itu dari sayap kanan atau sayap kiri. Hal yang sama juga berlaku untuk gerakan, betapapun baiknya niat mereka: jika mereka tidak berakar dari tempat leluhur, maka akan

berujung kekerasan, yang akan menimbulkan penolakan akan perbedaan atau keberagaman.

(1) Undang-Undang No. 2979 dari 15 Juni 1969 menempatkan tanah publik untuk dijual dan menyebabkan perampasan tanah dan konflik agraria. Undang-undang ini dinamai José Sarney, salah satu oligarki terbesar di Maranhão, berasal dari nama gubernur negara bagian saat itu yang kemudian terpilih menjadi presiden Brasil dari April 1985 sampai dengan Maret 1990.

(2) Pada tanggal 30 April 2017, lebih dari 30 masyarakat adat mendapatkan serangan yang sangat keras yang menyebabkan lima orang terluka oleh peluru (diantaranya adalah orang-orang Kum'tum), dua orang dengan tangan terputus (salah satunya dipenggal) dan lima belas lainnya terluka, termasuk remaja. Untuk informasi lebih lanjut, lihat disini [For more information, see here](#)

(3) Komunitas Quilombola dibentuk oleh keturunan orang-orang Afrika yang menjadi sasaran perbudakan di wilayah kolonial dan kekaisaran Brasil. Moquibom adalah salah satu organisasi quilombola di Maranhão, yang merupakan negara dengan jumlah komunitas sejenis terbesar di dunia. INCRA adalah agen yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan tanah masyarakat quilombola.

(4) Juçaral adalah sekelompok pohon palem juçara atau telapak kipas, yang menyediakan makanan bagi masyarakat adat.

Renungan Penduduk desa di Sierra Leone tentang Masa Depan setelah Memenangkan kembali Tanah Mereka dari Perusahaan Kelapa Sawit

Setelah hampir satu dekade berjuang melawan perusahaan yang merampas dan mendirikan perkebunan kelapa sawit di atas tanah mereka, pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat. Sekarang mereka mencoba mencari tahu apa yang harus mereka lakukan dengan tanah luas yang telah ditanami oleh barisan pohon kelapa sawit.

Warga desa di Distrik Port Loko, Sierra Leone sedang merayakan kemenangan mereka. **Setelah hampir satu dasawarsa berjuang melawan perusahaan yang merampas tanah mereka dan mendirikan perkebunan kelapa sawit, pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat. Sekarang mereka mencoba mencari tahu apa yang harus mereka lakukan dengan area tanah luas yang telah dihuni oleh barisan pohon kelapa sawit.**

Hikayat penduduk desa Port Loko ini dimulai pada tahun 2009, ketika seorang mantan prajurit pasukan Inggris datang ke Sierra Leone untuk memperoleh tanah untuk perkebunan kelapa sawit atas nama perusahaan Inggris yang tidak dikenal tanpa pengalaman dalam agribisnis. Dalam kurun waktu tiga tahun, Kevin Godlington mendapatkan kesepakatan yang mencakup lebih dari 200.000 hektar tanah di distrik Pujehun, Tonkolili dan Port Loko. (1) Segera setelah itu, sebagian besar transaksi tanah ini kemudian dijual seharga jutaan dolar kepada perusahaan lain yang mulai

bekerja membersihkan lahan dan mendirikan perkebunan kelapa sawit. Tanah di Port Loko diperjual belikan kepada Siva Group - sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura yang dimiliki oleh seorang pengusaha miliarder India. (2)

Kesepakatan Godlington dilakuka dengan melanggar standar internasional paling dasar dari persetujuan jual beli dengan komunitas masyarakat adat. **Dalam beberapa kasus, tokoh masyarakat mengira mereka menandatangani tanda terima untuk hadiah Natal ketika mereka sebenarnya menandatangani dokumen untuk menyerahkan tanah mereka.** (3)

Desa Mamanka, di Bureh Chiefdom, Distrik Port Loko, adalah salah satu komunitas yang kehilangan tanah mereka melalui proses ini. Pada tahun 2009, perusahaan Godlington, Sierra Leone Agriculture Ltd, menandatangani perjanjian tanah yang memberi perusahaan 6.557 hektar lahan mereka, dan meninggalkan masyarakat tanpa tanah untuk memproduksi makanan mereka sendiri. Kesepakatan itu merupakan bagian dari kesepakatan yang lebih besar untuk 41.582 hektar, yang melibatkan beberapa desa lain di kabupaten tersebut. Setahun kemudian, Siva Group membeli 95% saham Sierra Leone Agriculture Ltd, sementara Goldington mempertahankan 5% saham perusahaan (4)

Pada bulan Agustus 2018, GRAIN, WRM dan Bread for All menemani para tokoh masyarakat dari daerah yang terkena dampak perkebunan kelapa sawit di Afrika Barat dan Tengah dalam kunjungan ke desa Mamanka sebagai bagian dari lokakarya (5) yang diselenggarakan oleh Jaringan Sierra Leone tentang Hak untuk Makanan (SiLNoRF), Aksi Perempuan untuk Martabat Manusia (WAHD) dan organisasi lainnya.

Dalam acara tersebut, kami membawa salinan perjanjian tanah yang telah ditandatangani dengan Sierra Leone Agriculture Ltd. (6) Yang mengejutkan kami, ini adalah pertama kalinya penduduk desa melihat salinan perjanjian tersebut. Ketika mereka melihatnya, mereka dengan cepat menyadari bahwa itu adalah penipuan. Mereka memberi tahu kami bahwa **tidak ada satupun otoritas lokal dari komunitas mereka yang menandatangani perjanjian, dan beberapa dari tanda tangan tersebut adalah dari orang-orang yang bahkan bukan pemilik tanah di daerah tersebut.** Penduduk desa juga mengatakan bahwa mereka telah menentang proyek tersebut ketika diserahkan kepada mereka, dan bahwa mereka sangat terancam dan diintimidasi ketika mereka mencoba untuk secara damai mencegah perusahaan dari membersihkan dan menduduki tanah mereka.

Penduduk desa juga memberi tahu kami bagaimana perusahaan telah membuat banyak janji kepada mereka, seperti penyediaan pekerjaan yang baik dan sekolah untuk anak-anak, dan bahwa tidak ada satupun janji yang pernah terwujud. **Hanya beberapa dari mereka yang dipekerjakan oleh perusahaan sejak mulai beroperasi, dan sudah hampir setahun sejak perusahaan terakhir kali membayar upah kepada para pekerja tersebut.** Ketika kami mengunjungi desa-desa terdekat lainnya yang terkena dampak perjanjian tanah yang sama, mereka menceritakan kisah serupa tentang bagaimana perusahaan tidak memenuhi janjinya dan mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan kerawanan pangan di daerah tersebut.

Namun, para wanita di Desa Mamanka sangat tersentuh oleh cerita yang mereka dengar selama pertemuan para pemimpin dari Port Loko dari masyarakat di bagian lain Sierra Leone dan negara-negara Afrika lainnya yang juga dipengaruhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. **Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam penderitaan mereka dan bahwa tindakan dapat diambil untuk merebut kembali tanah mereka.**

Pada akhir pertemuan, para wanita dan peserta lain dari Mamanka telah tiba di satu keputusan yang jelas untuk perusahaan yaitu pengembalian tanah mereka; pembayaran gaji dan sewa yang belum dibayar; dan pembatalan perjanjian sewa tanah. Keseluruhan 36 organisasi yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut menandatangani pernyataan yang mendukung tuntutan ini.

Menurut kepala desa perempuan Desa Mamanka, Yarbom Kapri Dumbuya (sebelumnya Mamusu Dumbuya) perjuangan mereka untuk mendapatkan kembali tanah mereka diintensifkan setelah pertemuan-pertemuan ini. **“Kami belajar banyak dari pengalaman yang dibagikan oleh perempuan lain di seluruh negeri dan di Afrika,”** katanya kepada Aminata Finda Massaquoi dari Radio Budaya, selama kunjungan ke desa pada November 2018.

Perjuangan mereka akhirnya mendapat perhatian dari sebuah organisasi hak-hak hukum, NAMATI. Petugas organisasi mengunjungi komunitas dan setuju untuk memberikan mereka perwakilan dan bantuan hukum untuk membawa perusahaan ke pengadilan. **Setelah beberapa sesi di pengadilan, pengadilan memutuskan mendukung masyarakat, memerintahkan Sierra Leone Agriculture Ltd untuk mengembalikan semua tanah ke desa-desa Port Loko dan membayar mereka \$ 250.000 dalam bentuk sewa yang belum dibayar. (7)**

Berbicara sambil berlinang melalui air mata, para wanita di Desa Mamanka memberi tahu Aminata betapa lega rasanya bisa sekali lagi menginjak tanah pertanian mereka tanpa dilecehkan. Mereka berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung mereka selama perjuangan mereka.

Namun masih banyak tantangan bagi masyarakat. Perusahaan meninggalkan mereka dengan sumur setengah jadi yang berbahaya, dan sekitar 1.500 hektar tanah mereka sekarang ditanami oleh pohon kelapa sawit industri. Penduduk desa Mamanka tidak yakin apa yang harus mereka lakukan dengan perkebunan ini. Haruskah mereka mencoba untuk menghilangkan kelapa sawit dan menghasilkan tanaman pangan lainnya? Haruskah mereka membentuk koperasi untuk memproduksi minyak sawit mereka sendiri? Apakah ada cara untuk mengintegrasikan keduanya?

Satu perusahaan yang mungkin menghubungi penduduk desa Port Loko untuk mencoba dan membujuk mereka menandatangani perjanjian baru adalah perusahaan Natural Habitats dari Belanda. Perusahaan ini menjalankan perkebunan kelapa sawit di negara ini, tetapi juga mengikuti skema penumbuhan kontrak dengan petani untuk memproduksi minyak sawit bersertifikat organik. Karena alasan ini, perusahaan ini kadang-kadang digambarkan lebih baik daripada perusahaan perkebunan besar. Akan tetapi, warga Port Loko harus waspada karena Kevin Godlington, orang yang mengatur perjanjian tanah yang merampok tanah mereka sepuluh tahun yang lalu, ternyata adalah Chief Operational Officer Natural Habitats!

(8)

Kemenangan dan keberanian penduduk desa Port Loko untuk mendapatkan kembali tanah mereka adalah inspirasi bagi masyarakat yang terkena dampak perkebunan kelapa sawit dari seluruh Afrika dan dunia, beberapa di antaranya juga sedang berjuang melawan perampasan tanah oleh Siva Group. Sekarang, perjuangan baru dimulai bagi masyarakat Port Loko untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah kehilangan kendali atas tanah mereka lagi.

Artikel ini sebagian didasarkan pada laporan dari Aminata Finda Massaquoi dari kunjungannya ke Desa Mamanka pada bulan Oktober 2018.

[The various land deals can be viewed here.](#) (Beragam kesepakatan tanah dapat dilihat disini)

(2) GRAIN, "[Feeding the one percent.](#)" 7 October 2014

(3) Caitlin Ryan, "[Large-scale land deals in Sierra Leone at the intersection of gender and lineage](#),"

Third World Quarterly, Vol. 39, 2018.

(4) Wawancara dilakukan oleh Joan Baxter dan disediakan untuk GRAIN, 2013

(5) Porto Loko Declaration: [Women say "We Want our Lands Back!"](#)

(6) [The land deal can be viewed here.](#) (Perjanjian tanah dapat dilihat disini)

(7) Cooper Inveen, "[Sierra Leone ruling against palm oil company will empower communities – campaigners,](#)" Reuters, 12 November 2018

(8) <https://www.natural-habitats.com/about/team/>

Membayangkan Kembali Kesejahteraan: Desa-desa di Korchi taluka, India, Melawan Tambang dan Membuka Ruang-Ruang untuk Tata Pemerintahan Mandiri

Majelis desa di Korchi, bersama dengan gerakan perlawanan terhadap pertambangan, secara aktif terlibat dalam menata ulang dan merekonstruksi pemerintahan lokal. Persatuan Kolektif perempuan juga sudah mulai menegaskan suara mereka di ruang pengambilan keputusan ini. Artikel ini mencoba memberikan sekilas mengapa dan bagaimana proses ini terungkap.

Gram Sabhas (majelis desa) di Korchi taluka, distrik Gadchiroli, negara bagian Maharashtra, India, bersama dengan perlawanan lokal terhadap penambangan yang didukung oleh pemerintah, secara aktif terlibat dalam menata ulang dan merekonstruksi institusi pemerintahan lokal. 90 dari 133 Gram Sabha di Korchi taluka (sejenis tingkat administrasi pemerintah) telah berkumpul untuk membentuk federasi majelis desa yang mereka sebut Maha Gramsabha (Gram Sabha yang lebih besar).

Pada saat yang sama, persatuan kolektif perempuan juga mulai menegaskan suara mereka tidak hanya dalam menentang pertambangan tetapi juga di penataan desa yang baru muncul ini dan lembaga pembuat keputusan tingkat *taluka*, termasuk Maha Gramsabha. Pekumpulan kolektif ini muncul sebagai platform untuk menentang penambangan, merancang strategi, aturan dan peraturan untuk pengelolaan dan konservasi hutan, melokalisasi kendali atas mata pencaharian mereka dan sumber daya ekonomi lainnya, menghidupkan kembali identitas budaya, meningkatkan kepedulian sosial dan kesetaraan, menegaskan demokrasi langsung dan yang timbul dan mempertanyakan keberadaan model pengembangan yang ada. Artikel ini adalah upaya untuk memberikan gambaran mengapa dan bagaimana proses ini berlangsung.

Perlawanan dan organisasi dari bawah

Meskipun secara resmi dikelola oleh Administrasi Kabupaten Gadchiroli dan memilih Panchayats (komite eksekutif dari satu atau lebih desa terpilih sebagai unit tata kelola pertama dalam Sistem Panchayati Raj India, atau pemerintahan mandiri lokal), orang-orang di Korchi *taluka* secara informal terus memiliki tradisi mereka Gram Sabhas dan Ilakas (wilayah yang terdiri dari beberapa desa) sebagai struktur pemerintahan mandiri tingkat desa dan supra desa. Dengan sedikit kekuatan politik dan ekonomi, lembaga-lembaga informal ini hingga baru-baru ini hanya berfokus pada kegiatan sosial-budaya atau konflik. Dihuni oleh 133 Gram Sabha dengan 43.000 anggota (73 persen milik komunitas suku asli Gond dan Kanwar), Korchi *taluka* memiliki tiga *Ilaka* tradisional yaitu, Kumkot, PadyalJob, dan Kodgul *Ilaka*.

Hampir 85 persen dari distrik Gadchiroli ditutupi oleh hutan yang hampir seluruh populasi sangat bergantung pada hutan untuk mata pencaharian baik berbentuk uang maupun penghidupan. Selain menjadi penting bagi ekonomi dan mata pencaharian lokal, hutan juga merupakan bagian integral dari praktik sosial-budaya dan identitas politik adivasi. Namun sampai saat ini masyarakat memiliki akses dan hak guna terbatas karena undang-undang pemerintahan kolonial, tata kelola hutan dan hukum manajemen, kebijakan dan birokrasi, yang mengarah ke budaya suap dan penyalahgunaan hutan. Hutan-hutan ini juga penting bagi pemerintah setempat. Ekstraksi komersial terhadap produk kayu dan non-kayu lainnya secara konvensional telah dilakukan oleh departemen kehutanan melalui sewa yang diberikan kepada kontraktor dan perusahaan kertas dan bubur kertas, dan, belakangan ini, juga kepada perusahaan pertambangan.

Selama beberapa dekade, orang-orang di Gadchiroli telah menentang kebijakan hutan yang menindas dan mengalienasi atau mengasingkan pribumi, suap dan kekejaman yang dilakukan pada komunitas suku setempat. Ditambah lagi baru-baru ini adanya penambangan yang disponsori oleh negara. Antara tahun 1990 dan 2017, 24 sewa guna usaha penambangan telah disetujui atau diusulkan di Kabupaten ini, secara kolektif berdampak pada sekitar 15.000 hektar hutan lebat secara langsung dan lebih dari 16.000 hektar secara tidak langsung. Di Korchi *taluka* saja sekitar 12 sewa penambangan diusulkan meskipun ditentang kuat oleh penduduk setempat, berdampak pada 1032,66 hektar.

Pada tahun 2006, untuk mendukung perjuangan akar rumput yang sudah berlangsung lama di seluruh India melawan kebijakan pengucilan, penindasan, top-down hutan dan konservasi, Parlemen India akhirnya memberlakukan undang-undang penting: Undang-Undang Suku dan Penghuni Hutan Tradisional Lainnya (Hak Pengakuan) Act 2006, juga disebut Undang-Undang Hak Hutan India (selanjutnya disebut FRA). FRA menyediakan catatan 14 jenis hak hutan adat yang sudah ada tetapi belum diakui bagi suku-suku yang diadwakan dan penghuni hutan tradisional lainnya. Yang paling penting di antaranya adalah hak **Gram Sabha untuk mengklaim hak untuk menggunakan, mengelola, dan melestarikan hutan tradisional mereka dan melindunginya dari ancaman internal dan eksternal.** Undang-undang ini juga mensyaratkan persetujuan bebas, dimuka, dan jelas dari Gram Sabha sebelum hutan adat mereka dialihkan untuk tujuan non-kehutanan. **Di antara banyak ketentuan radikal dari undang-undang ini dan yang paling signifikan adalah kuatnya visi unit dasar pemerintahan untuk menjadi Gram Sabha** - untuk ditentukan secara mandiri oleh sekelompok orang yang tinggal di sebuah pemukiman baik yang termasuk kedalam golongan desa maupun tidak dalam catatan pemerintah sejauh ini.

Memberdayakan Gram Sabha

Setelah kampanye berkelanjutan, hak untuk menggunakan, mengelola, dan melestarikan hutan tradisional mereka dari 85 Gram Sabha di Korchi taluka akhirnya diakui diantara tahun 2009 dan 2011. Proses ini memungkinkan memberdayakan Gram Sabha untuk mengatur hutan mereka dan juga secara berkelanjutan menggunakannya, karena sekarang berada di bawah kepemilikan mereka.

Beberapa pemimpin lokal, terutama dari desa-desa yang telah menerima hak-hak khusus ini, juga menghadapi ancaman dari proyek pertambangan, Mereka menggunakan kesempatan ini untuk memahami bagaimana hukum seperti FRA dapat memperkuat dan memberdayakan Gram Sabha serta **bagaimana memobilisasi masyarakat lokal untuk memahami bagaimana Gram Sabhas yang diberdayakan secara hukum dapat bekerja untuk merubah nasib sendiri dan tata pemerintahan yang mandiri, termasuk menegaskan kendali mereka kontrol yang lebih besar namun tetap adil terhadap hutan dan ekonomi lokal.** Pertemuan tingkat Taluka mengarah ke diskusi yang intens tentang fungsi, hak,

kekuasaan, dan tugas Gram Sabha. Sampai dengan 2017, 90 desa di Korchi taluka telah membangun kembali dan memperkuat Gram Sabhas desa mereka menjadi badan pembuat keputusan yang inklusif, transparan dan akuntabel di tingkat desa. Setiap Gram Sabha membuka rekening bank, menunjuk seorang sekretaris dan seorang presiden. Para petugas kantor ini bertanggung jawab atas komunikasi desa dengan pejabat pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya. Gram Sabhas kemudian mulai bernegosiasi dan memasarkan produk hutan non-kayu mereka. Keuntungan sekarang sepenuhnya dikelola oleh Gram Sabha, yang digunakan untuk membayar tenaga kerja (semua keluarga di desa), menyisakan beberapa persentase untuk rekening bank desa dan membagikan sisanya sebagai bagian keuntungan kepada para petugas pengumpul pendapatan ini. Gram Sabhas, mulai menjadi organisasi berdaya secara ekonomi dan hukum. Pada tahun 2014, pendapatan organisasi ini adalah nol, namun pada tahun 2017, 87 Gram Sabha memiliki total pendapatan dari penjualan produk hutan non-kayu lebih dari 120 juta rupee (sekitar US \$ 1.700.000).

Pada tahun 2016, *Ilakas* tradisional mulai melihat diri mereka sebagai badan di tingkat supra desa dari Gram Sabha. **Perkumpulam *Sabda Ilaka* tradisional mulai memasukkan pembahasan tentang pemberdayaan Gram Sabha, demokrasi langsung, penentuan nasib sendiri, FRA, pertambangan dan dampaknya, pertumbuhan dan perkembangan, kolonisasi dan imperialisme, dan lain-lain.** Beragam upaya dilakukan untuk memahami kembali makna kata '*adivasi*' (adat/asli), budaya dan sejarah *adivasi*, menceritakan kembali kisah-kisah pahlawan suku yang revolusioner (biasanya tidak terlihat dalam narasi sejarah arus utama) dan memahami kooptasi budaya *adivasi* animistik ke dalam agama –agama yang dominan.

Maha Gramsabha - Federasi Gram Sabhas

Ketika Gram Sabha mulai mendapatkan pemberdayaan dan pengakuan, mereka berusaha berkembang untuk menjadi lebih kuat untuk mendukung organisasi yang baru saja mulai mengorganisir diri mereka sendiri serta untuk saling belajar dan berbagi dukungan yang dibutuhkan. Memanen produk hutan non-kayu yang penting secara komersial dan menjualnya membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan untuk menghadapi kekuatan pasar. Sementara, **memahami dan**

mengatasi strategi memecah belah perusahaan pertambangan membutuhkan tindakan kolektif.

Ilaka sabha tradisional memiliki keterbatasan untuk dapat mengatasi masalah ini. Untuk memastikan bahwa pasar tidak mengeksploitasi yang lebih lemah, kesetaraan dalam pembagian manfaat pun kemudian dicapai diiringi terjadinya proses berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan kerjasama. Pada tahun 2017, sebuah federasi yang terdiri dari 90 Gram Sabha dibentuk. Maha Gramsabha (MGS) sekarang merupakan ruang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan peraturan normatif bagi masyarakat lokal untuk tata kelola. Setiap Gram Sabha memilih 2 wanita dan 2 pria untuk mewakili mereka di MGS, mengeluarkan resolusi untuk bergabung dengan MGS dan mematuhi aturan dan peraturannya. Semua perwakilan yang ditunjuk wajib melaporkan kembali ke Gram Sabha masing-masing. Seluruh informasi kebijakan terbaru dibahas dan keputusan pun diambil, tetapi tentunya ini dikembalikan ke konstituen Gram Sabha untuk diratifikasi. Sebelum penerimaan keputusan, proposal untuk tindakan-tindakan kedepan dibahas dan rincian biaya yang dikeluarkan dibagikan.

Perempuan, pertambangan dan peran kolektif perempuan

Dalam masyarakat yang sebagian besar patriarkal ini, perempuan tidak banyak berbicara dalam tata kelola desa dan hutan tradisional. Perempuan juga menghadapi sejumlah tantangan sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh alkoholisme, kurangnya sumber daya, properti, atau hak pengambilan keputusan.

Didukung oleh LSM lokal Amhi Amchi Arogyasaathi, perlahan-lahan, paroki-paroki perempuan / *parishads* (kolektif) mulai memantau implementasi undang-undang dan skema yang akan memberdayakan perempuan. Paroki-paroki ini menjadi kelompok pendukung bagi perempuan yang menghadapi ketidakadilan, penindasan, kekerasan atau masalah lain apa pun dalam keluarga atau dalam masyarakat yang lebih luas. **Ketika kesadaran di kalangan perempuan meningkat dan mereka menemukan rasa percaya diri untuk menyuarakan pendapat mereka, banyak perempuan mengungkapkan bahwa kesejahteraan mereka dan keluarga mereka memiliki hubungan integral dengan kesejahteraan hutan. Oleh karena itu, penting bagi**

perempuan untuk membahas masalah degradasi hutan dan hak untuk menggunakan dan melindungi mereka.

Kesadaran ini menjadi sangat penting bagi perempuan pada tahun 2009, terutama di desa-desa di mana hutan tradisional mereka disewakan untuk pertambangan. Melalui *parishad* mereka, perempuan menjadi salah satu kekuatan tangguh dalam perlawanan terhadap pertambangan. **Oposisi fisik dan ekspresi vokal mereka dalam berbagai pertemuan untuk menentang pertambangan, termasuk dengar pendapat publik yang disponsori negara, berhasil membuat kontrak penambangan tetap tertunda hingga tanggal ini di Korchi taluka.** Selanjutnya, melalui paroki mereka, perempuan telah melakukan banyak diskusi tentang dampak penambangan dalam kehidupan mereka, keluarga dan hutan dan kebutuhan untuk melindungi hutan. Paroki juga sangat penting dalam mengangkat para pemimpin perempuan di berbagai platform untuk menceritakan perjuangan dan pendapat mereka, termasuk konsepsi kesejahteraan mereka, yang sangat terkait dengan hutan yang sehat.

Selama perlawanan terhadap penambangan di Korchi taluka, para pemimpin perempuan di paroki mulai menyadari dan mendiskusikan bahwa meskipun perempuan selalu berada di garis depan perlawanan, mereka tidak memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan tentang desa atau hutan. Pada tahun 2015, diskusi tentang Gram Sabha sebagai unit pemerintahan mandiri mulai dilaksanakan, pertemuan tingkat taluka diselenggarakan, implementasi FRA dibicarakan di berbagai pertemuan tingkat taluka dan Ilaka, namun, tidak ada yang melihat masalah partisipasi perempuan, hak-hak perempuan di bawah Undang-Undang dan pemberdayaan ekonomi perempuan dari hasil hutan. Beberapa pemimpin wanita pun akhirnya mulai berpartisipasi dalam pertemuan tingkat taluka.

Dalam salah satu pertemuan pertama Maha Gramsabha, anggota parishad menegaskan **bahwa selain menantang birokrasi hegemonik dan top-down, juga penting untuk menantang struktur tradisional yang telah melegitimasi penindasan terhadap perempuan dan membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan , termasuk keputusan di sekitar dan tentang hutan.** Mereka memastikan bahwa MGS mencakup dua orang perwakilan wanita bersama dengan dua orang pria dari masing-masing Gram Sabha. Memiliki unit pengambilan

keputusan pertama di Gram Sabha, di dalam desa mereka, daripada parishad, yang jauh dari desa, memberikan peluang yang jauh lebih besar untuk partisipasi perempuan. Melalui upaya parishad, beberapa Gram Sabha juga telah melakukan upaya khusus untuk memastikan bahwa pertemuan diadakan pada saat perempuan dapat berpartisipasi. Parishad juga memastikan bahwa Korchi taluka adalah salah satu dari sedikit organisasi di negara di mana hak-hak perempuan di bawah FRA sedang difokuskan. FRA memberikan sertifikat tanah bersama atas tanah untuk istri dan suami. Di banyak desa di Korchi, sertifikat diterbitkan bersama tetapi yang lain juga atas nama perempuan sebagai pemilik pertama atau perempuan sebagai pemilik tanah eksklusif.

Melangkah lebih jauh, banyak Gram Sabha juga telah mengambil keputusan bahwa perempuan akan mendapatkan upah harian dan juga keuntungan dari penjualan hasil hutan non-kayu secara langsung di rekening mereka sendiri, bukan melalui rekening suami mereka. Faktanya, satu desa, Sahle, telah memutuskan bahwa seluruh keuntungan yang diperoleh keluarga dari hasil hutan hanya akan masuk ke rekening para wanita keluarga – sebuah keputusan yang kuat dan unik.

Kesimpulan

Proses penegasan hak, tata kelola mandiri dan pengelolaan hutan di Korchi masih barada dalam tahun-tahun awal dan sedang berlangsung secara organik. Sejumlah faktor pendukung telah memainkan peran penting dalam proses menuju perlawanan, tata kelola mandiri, dan penegasan konsepsi kesejahteraan lokal di Korchi. Perjuangan ini **juga meliputi sejarah panjang mobilisasi politik dan debat tentang 'pembangunan', menciptakan ruang kepemimpinan lokal yang kuat untuk pria dan wanita; kehadiran pemimpin unik yang mengarah ke debat dan wacana ideologis; ruang hukum yang disediakan oleh hukum yang memungkinkan seperti FRA; proses belajar dan pertukaran orang ke orang; manfaat ekonomi yang lebih besar dari pelokalan ekonomi produk hutan non-kayu; yang memungkinkan dukungan namun tidak memaksakan oleh organisasi dan aktivis individu.**

Perkembangan perjuangan ini mengarah pada proses yang selalu waspada, gesit, dan multidimensi dalam menjawab tantangan baik internal maupun eksternal. Ini termasuk menanggapi kebijakan negara yang hegemonik dan

menindas, termasuk militerisasi berat dan kebijakan ekonomi makro yang sangat condong mendukung korporatisasi dan privatisasi; atau menangani hegemoni internal dan patriarki. Melibatkan suara perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat menjadikan organisasi sosial menjadi lebih adil, resistensi yang lebih kuat terhadap pertambangan, pengelolaan hutan dan konservasi yang lebih efektif dan konsep kesejahteraan lokal yang layak secara budaya dan ekologis sebagai alternatif model pembangunan berbasis ekstraksivisme .

Neema Pathak Broome, Shrishtee Bajpai dan Mukesh Shende

Neema dan Shrishtee adalah anggota Kalpavriksh, yang berbasis di Pune sementara Mukesh bekerja dengan Amhi Amchi Arogyasaathi dan berbasis di Gadchiroli.

(1) Artikel ini didasarkan pada studi jangka panjang yang dilakukan oleh Kalpavriksh, dengan Amhi Amchi Arogyasaathi (AAA) dan Korchi Maha Gramsabha sebagai bagian dari proyek ACKnowl-EJ (Akademi-Aktivis Pengetahuan Diproduksi Bersama untuk Keadilan Lingkungan) . ACKnowl-EJ adalah jaringan ilmuwan dan aktivis yang terlibat dalam aksi dan penelitian kolaboratif yang bertujuan untuk menganalisis potensi transformatif dari respon masyarakat terhadap ekstraktivisme dan alternatif yang lahir dari perlawanan (<http://acknowledgej.org/>)

Perlawanan oleh Pembela Perempuan Wilayah terhadap Ekstraktivisme di Amerika Latin

Di Amerika Latin, perempuan selalu menjadi bagian dari perjuangan historis dalam mempertahankan wilayah dan lingkungan. Melalui protes dan kegiatan sehari-hari, mereka menentang ekstraktivisme dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai cara.

Di Amerika Latin, perempuan selalu menjadi bagian dari perjuangan historis dalam mempertahankan wilayah dan lingkungan. Melalui protes mobilisasi dan dalam praktik sehari-hari mereka, mereka telah menentang ekstraktivisme dan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. **Selain berada di garis depan perjuangan, mereka secara harfiah "menggunakan tubuh mereka sendiri" untuk menghentikan perusakan wilayah mereka, mereka juga telah mengajukan pandangan kritis tentang sifat patriarkal dan rasis dari ekstraktivisme.** Melalui pernyataan feminis bahwa "pribadi adalah politik" **mereka mempertanyakan praktik seksis dalam gerakan sosial, melampaui stereotip dan peran gender, dan menciptakan ruang otonom berdasarkan solidaritas dan kepedulian kolektif.** Dalam artikel berikut ini kami akan berbagi beberapa refleksi tentang perjuangan

mereka, menawarkan tinjauan singkat tentang konteks saat ini dari model ekstraktif di wilayah tersebut dan dampak spesifiknya terhadap kehidupan perempuan.

Ekstraksivisme adalah model ekonomi dan politik yang didasarkan pada komodifikasi dan eksploitasi alam yang tidak terkendali. Di Amerika Latin, hal ini telah menjadi meningkat dan lebih produktif sejak 1990-an. Model ini menghasilkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, mencemari sumber udara, tanah dan air dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang parah. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak kolektif dari komunitas yang terkena dampak, karena menghancurkan cara hidup tradisional dan ekonomi, dan membuat komunitas seperti itu bergantung pada pasar eksternal.

Ekstraksivisme, dalam berbagai bentuknya, ditandai dengan penjarahan dan perampasan. Model ini didasarkan pada rasisme struktural yang memanifestasikan dirinya dalam perampasan wilayah leluhur, penolakan praktik budaya dan cara-cara merawat alam masyarakat adat, masyarakat keturunan afro dan penduduk asli pulau dari ras campuran.

Bagaimana ekstraksivisme beroperasi Amerika Latin?

Di Amerika Latin dan Karibia, sifat perusak dari model ekstraktif terlihat jelas baik dalam dampak negatif yang dihasilkannya maupun dalam berbagai strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengambil alih seluruh wilayah, dengan berkolusi dengan pemerintah tempat kegiatan tersebut dilakukan, dan seringkali dengan kolusi antara pemerintah mereka sendiri dan negara asal tempat perusahaan tersebut berada.

Kompleksnya keterlibatan antara perusahaan, pemerintah, dan dalam banyak kasus, kelompok bersenjata ilegal dan pasukan bayangan lainnya, dapat diamati dalam tingkat dan tahapan konflik sosial-lingkungan yang berbeda: a) undang-undang dan kebijakan yang mendukung masuknya investasi dan perusahaan dalam sasaran negara; b) pelanggaran atas hak untuk konsultasi awal, tidak dibatasi dan dengan pemberitahuan sebelumnya dan secara umum untuk partisipasi masyarakat sipil, yang memungkinkan proyek untuk dijalankan meskipun ada tantangan lokal; c) pertahanan instalasi perusahaan melalui militerisasi wilayah dan koordinasi dengan kelompok bersenjata dan kejahatan terorganisir; dan d)

intervensi hakim dan jaksa penuntut yang menyangkal bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab apa pun, sehingga memungkinkan berlakunya impunitas atau kebal hukum.

Saat ini, Amerika Latin terus menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka yang berusaha mempertahankan wilayah mereka: **60% dari semua pembunuhan orang yang membela bumi dan lingkungan di dunia telah dicatat di wilayah ini.** menurut laporan terbaru yang diterbitkan oleh LSM internasional Global Witness. Negara-negara dengan angka pembunuhan tertinggi adalah Brasil, Kolombia, Honduras, Guatemala, Peru dan Nikaragua, (2)

Kriminalisasi adalah salah satu strategi utama yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk menghentikan perlawanan terhadap proyek-proyek megaproaktif. Ini terjadi melalui stigmatisasi perbedaan pendapat, pencemaran nama baik melalui media atau pernyataan yang dibuat oleh pejabat publik, penindasan terhadap protes sosial dan penggunaan litigasi atau penuntutan pidana terhadap para pembela HAM. Hal ini diperparah oleh standar ganda sistem peradilan: sementara perusahaan menikmati keamanan hukum dan perlindungan bersenjata untuk menguasai seluruh wilayah, mereka yang berjuang untuk mempertahankan wilayah tersebut dianiaya dan dijatuhi hukuman berat.

Bagaimana pengaruh perempuan khususnya?

Extractivisme didasarkan pada dan memperburuk budaya patriarki, yang memiliki pengaruh khusus pada cara hidup wanita. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli teori feminis dan pembela tanah adat, terdapat persamaan budaya, sejarah, dan simbolis antara eksploitasi dan kontrol atas tubuh dan alam perempuan. Dalam konteks penambangan dan eksploitasi minyak dan instalasi hidroelektrik, misalnya, 'maskulinisasi' wilayah terjadi (3) di mana ruang komunitas dan kehidupan sehari-hari direstrukturisasi berdasarkan keinginan dan nilai-nilai maskulinitas hegemonik.

Para pembela hak-hak tanah adat dan perempuan telah mengancam bahwa praktik perampasan dan pencemaran wilayah terjadi bersamaan dengan kebangkitan kekerasan patriarkal terhadap perempuan dan anak perempuan dan memperburuk ketidaksetaraan gender. Hal di atas terjadi di semua bidang kehidupan mereka dan dinyatakan dalam: a) peningkatan beban kerja dalam hal

pekerjaan perawatan yang dilakukan oleh perempuan; b) hilangnya otonomi ekonomi dan kedaulatan pangan; c) peningkatan kekerasan psikologis, fisik, ekonomi, patrimonial dan seksual dalam konteks keluarga dan masyarakat; d) dampak pada kesehatan fisik, emosi dan reproduksi karena kontak dengan udara, tanah dan air yang terkontaminasi; e) diskriminasi berdasarkan gender dan pelanggaran hak atas partisipasi warga negara dalam proses konsultasi sebelumnya, tidak dibatasi dan diinformasikan (4); f) meningkatnya eksploitasi seksual terhadap tubuh perempuan dan anak perempuan dan; g) hilangnya identitas budaya dan melemahnya peran komunitas dan leluhur perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan pembela wilayah adat

Kerentanan khusus dan berbagai serangan yang diderita oleh para wanita pembela wilayah adat menambah kekerasan yang dialami secara historis oleh wanita, dalam kerangka masyarakat yang dibentuk oleh ketidakadilan gender, ras dan kelas. Berbeda dengan rekan-rekan pria mereka, para pembela wanita dihadapkan pada serangkaian kekerasan yang lebih besar, khususnya pelecehan seksual. Selain menghadapi serangan oleh agen perusahaan dan negara, para pembela HAM tersebut mengalami banyak kekerasan setiap hari dalam konteks keluarga dan komunitas mereka, dan dalam banyak kesempatan, dalam organisasi mereka sendiri dan gerakan sosial campuran.

Meskipun statistik untuk wanita yang terbunuh lebih rendah dibandingkan dengan statistik rekan-rekan pria mereka, penting untuk menyoroti bahwa kasus-kasus pembunuhan atau "feminisida teritorial" sebagaimana dirujuk oleh beberapa pembela feminis di Guatemala, (6) disorot dan diselidiki secara khusus. **Tidak adanya pengakuan atas pekerjaan para pembela perempuan dan keberpihakan otoritas peradilan yang menerapkan prasangka misoginis dan rasis, mengakibatkan kasus-kasus seperti itu diklasifikasikan sebagai "Kejahatan Membabi buta," sehingga mengabaikan konteks perlawanan yang dipimpin oleh perempuan tersebut, atau bahkan membuat kasus-kasus tersebut seperti bunuh diri, yang pada dasarnya memperkuat impunitas. (7)**

Konsekuensinya, kekerasan semacam itu tidak berakhir dengan dihilangkannya keberadaan fisik para pembela wanita: cara di mana investigasi dilakukan -atau

kurangnya investigasi semacam itu- mengorbankan kembali para wanita, mengubah mereka menjadi pihak yang bersalah, dan mencegah keadilan dan tuntutan ganti rugi perkara bagi wanita dan keluarga mereka.

Differensiasi Kekerasan juga menyebabkan dampak yang berbeda pada kehidupan para pembela perempuan yang meliputi dampak negatif pada kesehatan fisik, emosional dan spiritual mereka, mulai dari gangguan tidur, penurunan berat badan, perasaan takut yang permanen, depresi, hingga penyakit yang lebih serius seperti kanker. Dikriminalisasi dan distigmatisasi juga berdampak buruk pada kesejahteraan ekonomi mereka, dan dalam banyak kasus mereka menjadi terisolasi di komunitas dan keluarga mereka sendiri. Pada tingkat kolektif, agresi ini melemahkan organisasi mereka, menyebarkan ketakutan di antara kawan-kawan perempuan mereka dan kadang-kadang mengakibatkan kehancuran atau stagnasi perjuangan mereka.

Proposal dari wanita Amerika Latin untuk pertahanan wilayah dan penghapusan kekerasan terhadap wanita

Dalam kerangka kerja mereka sebagai penjaga dan pembela alam dan lingkungan, para perempuan ini telah mengembangkan berbagai tindakan yang memungkinkan ruang bagi tuntutan dan perspektif khusus mereka, dan pada banyak kesempatan, **mereka untuk sementara waktu mampu menghentikan atau melumpuhkan intervensi ekstraktif yang mengancam wilayah mereka**. Pada gilirannya, **mereka telah menghasilkan transformasi yang signifikan di baik tingkat pribadi maupun kolektif**, membangun praktik-praktik baru yang ditujukan untuk bentuk-bentuk perlindungan dan keamanan komprehensif.

Beberapa repertoar aksi sosial mereka meliputi: a) penciptaan ruang untuk artikulasi dan pertukaran pengalaman tentang pertahanan di tingkat nasional dan regional dan pembangunan jaringan regional untuk berkontribusi pada visibilitas, pendampingan dan penguatan pusat perlawanan lokal; b) protes dan tindakan de facto untuk mencegah kemajuan kegiatan ekstraktif, dan untuk memulihkan tanah: pemblokiran jalan, pawai, kamp permanen untuk memblokir instalasi pembangunan perusahaan; c) tindakan penegakan hukum untuk mengaktifkan mekanisme perlindungan dalam kerangka kerja nasional dan internasional dan kegiatan advokasi yang diarahkan pada otoritas lokal dan nasional, dan organisasi hak asasi manusia internasional; d)

dokumentasi dan pelaporan agresi dan kriminalisasi terhadap pembela wanita dan pembentukan strategi komunikatif untuk menarik perhatian pada perjuangan mereka; e) promosi konsultasi rakyat dan otonom sehingga masyarakat dapat mengekspresikan tekad mereka mengenai keputusan dan kegiatan yang mempengaruhi lingkungan mereka, dan perlunya melakukan konsultasi sebelumnya sesuai dengan standar internasional; f) praktik perlawanan sehari-hari terkait dengan kedaulatan pangan - pelestarian dan penggunaan tradisional benih asli, praktik agroekologi - dan ekonomi kerakyatan, feminis dan solidaritas dan g) praktik dan refleksi seputar perawatan diri dan perawatan timbal balik, termasuk penyembuhan pribadi dan kolektif.

Salah satu kontribusi utama dari perjuangan perempuan dan feminis untuk mempertahankan tanah dan properti umum adalah untuk menekankan hubungan antara lembaga dan wilayah. **Komunitas feminis komunitas Guatemala telah mengusulkan kategori tanah-lembaga wilayah untuk menyoroti bahwa perjuangan untuk mempertahankan tanah melawan ekstremisme harus dilakukan secara simultan dan tak terpisahkan dari perjuangan perempuan di wilayah tersebut untuk menjalani kehidupan yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi terhadap tubuh atau lembaga mereka .**

Dari pengalaman mereka sebagai pembela tanah, perempuan telah menempa posisi transformasi berdasarkan kepedulian terhadap kehidupan dalam semua manifestasinya yang beragam, dan dengan upaya yang terus meningkat mereka telah memadukan pemeliharaan bumi, terhadap diri mereka sendiri dan kolektif sebagai unsur-unsur yang sangat diperlukan untuk aktivisme dalam diri mereka. Visi komprehensif tentang kepedulian ini tercermin dalam cara bagaimana beberapa organisasi perempuan dan masyarakat adat memandang perlindungan: **perlindungan hak asasi manusia perempuan dan pembela lingkungan tentu terkait dengan perlindungan wilayah.** Dalam hal ini, organisasi mengusulkan langkah-langkah perlindungan dan praktik yang mencerminkan spiritualitas penduduk asli, suku asli dan campuran dari ras asli (Raizales). Dalam konteks ini, **pemulihan menjadi semakin relevan:** dari dialog pengetahuan antara masyarakat, konteks dan generasi, dan pemulihan ingatan leluhur, **pembela wanita tidak hanya memulihkan dampak serangan yang mereka derita karena aktivisme**

lingkungan mereka. , tetapi juga luka mendalam dari kekerasan struktural terhadap perempuan.

Laura María Carvajal Echeverry, Coordinator of the Women and Territories Program of the Urgent Action Fund for Latin America and the Caribbean (8)

(1) Artikel ini berdasarkan publikasi yang berjudul "[Extractivism in Latin America. Impacts on women's lives and strategies for the defense of territory.](#)"

(2) GLOBAL WITNESS, 2018. [At what cost? Irresponsible business and the murder of land and environmental defenders in 2017.](#)

(3) Lihat: CABNAL, Lorena. [Without being consulted: the commodification of our body-land territory](#), in: Women Defending the Territory. Penagalaman partisipasi di Amerika Latin. Urgent Action Fund of Latin America and the Caribbean, 2015; and GARCÍA TORRES, Miriam. [Feminism reactivates the struggle against 'extractivism' in Latin America](#). Diterbitkan di La Marea pada 17 Februari 2014, oleh Jaringan Amerika Latin Pembela Wanita tentang Hak Sosial dan Lingkungan (Hanya dalam Bahasa Spanyol).

(4) Untuk perspektif yang luas tentang hambatan partisipasi efektif perempuan dalam masalah lingkungan dan pengalaman perempuan di berbagai negara sehubungan dengan konsultasi populer, masyarakat dan otonomi, lihat publikasi kolektif kami bersama dengan pembela perempuan dari Argentina, Guatemala, Bolivia dan Ekuador: [Women defending the territory: experiences of participation in Latin America](#), 2015.

(5) Untuk tinjauan komprehensif tentang kriminalisasi dan serangan terhadap perempuan pembela wilayah, lihat [Regional Report on Patterns of criminalization and limitations on the effective participation of women who defend environmental rights, territory and nature in the Americas](#).

(6) Ini telah menjadi kategori yang dipromosikan oleh pembela wilayah wanita, termasuk Red de Sanadoras del Feminismo Comunitario de Guatemala (Network of Healers of Community Feminism of Guatemala).

(7) Untuk tinjauan komprehensif tentang impunitas, lihat [Regional Report on Impunity for Violence against Women Defenders of Territory, Common Goods, and Nature in Latin America](#), 2018.

(8) The Urgent Action Fund for Latin America and the Spanish-speaking Caribbean adalah dana feminis regional yang berkontribusi pada keberlanjutan dan penguatan aktivis dan gerakan mereka, dengan dukungan lincah dan strategis sehubungan dengan situasi risiko dan peluang. Kami mendukung perlawanan, perjuangan dan tuntutan perempuan pembela hak asasi manusia dan wilayah dalam transformasi sistem ketidakadilan dan ketidaksetaraan, menjadikan perlindungan dan perawatan feminis integral sebagai titik fokus utama. [Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami.](#)

Refleksi dari Afrika: Menaklukkan Rasa Takut untuk Membangun Gerakan yang Lebih Kuat

Wawancara dengan aktivis sosial dan lingkungan dan pembela HAM Nasako Besingi yang mengorganisir masyarakat dalam protes mereka terhadap perkebunan kelapa sawit AS di agribisnis Herakles Farm. Karena keterlibatannya ini, ia telah menjadi korban dari Serangan perusahaan Herakles Farm dan juga serangan fisik pemerintah, intimidasi dan kriminalisasi.

Sekretariat WRM melakukan wawancara dengan aktivis sosial dan lingkungan dan pembela hak asasi manusia Nasako Besingi. Ia adalah Direktur organisasi Kamerun yang bernama Perjuangan untuk Menghemat Lingkungan Masa Depan (Struggle to Economize the Future Environment/SEFE), yang mendukung perjuangan hak tanah masyarakat lokal terutama melawan perkebunan kelapa sawit. Nasako telah mengorganisir masyarakat dalam protes mereka terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan agribisnis AS Herakles Farm. Karena keterlibatannya ini, ia telah menjadi korban dari Serangan Pertanian dan serangan fisik pemerintah, intimidasi dan kriminalisasi. Aktivis itu dengan keras mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di sekitar krisis saat ini di wilayah Anglophone di Kamerun.

Seringkali, orang mendengar bahwa masyarakat di Afrika tidak dapat benar-benar membela atau mengklaim kembali tanah mereka dari perusahaan yang mendapatkan konsesi dari pemerintah nasional, karena, menurut Hukum nasional, “semua tanah adalah milik Negara”. Apa pandangan Anda tentang hal ini?

Pertama, apa yang dimaksud dengan Negara? Negara terdiri dari empat elemen utama: populasi, wilayah, pemerintahan dan kedaulatan. Oleh karena itu, frasa “semua tanah adalah milik Negara” tidak berarti bahwa tanah itu dimiliki oleh pemerintah, tetapi lebih oleh seluruh populasi yang tinggal di dalam wilayah suatu Negara, termasuk orang-orang dalam pemerintahan. Sebagian besar penduduk suatu Negara tinggal di komunitas, di mana mereka berjuang setiap hari untuk mempertahankan wilayah itu sendiri. Di sisi lain, istilah pemerintah paling tepat diterjemahkan sebagai lembaga yang akan diformulasikan, diekspresikan, dan

dijalankan, dan melaluinya kebijakan umum ditentukan dan diatur dalam hal pembangunan politik, ekonomi dan sosial. Memenuhi tugas-tugas itu tidak berarti diterjemahkan bahwa hak kepemilikan pemerintah mutlak atas tanah dan sumber daya alam Negara.

Adalah salah bagi pemerintah mana pun untuk mengklaim kepemilikan atas tanah, tanpa memikirkan hak masyarakat atas tanah tersebut. Faktanya, masalah tata cara tanah Afrika dipersiapkan dengan bantuan tuan tanah kolonial, yang, tanpa persetujuan penduduk, menyerahkan wilayah tersebut kepada presiden, yang tidak dipilih oleh penduduk tetapi seringkali dipilih sendiri oleh penjajah untuk melayani kepentingan jangka panjang mereka. Selain itu, gagasan bahwa "semua tanah adalah milik Negara" tidak memberikan pemerintah hak untuk memiliki tanah dan membuangnya secara sepihak, melainkan untuk membuat undang-undang dan mengatur masalah-masalah pertanahan, dengan mempertimbangkan dan menghormati kepentingan masyarakat.

Adalah tugas pemerintah untuk menjamin kebahagiaan, kebebasan dan kedamaian bagi penduduk serta untuk melindungi properti mereka. Selain itu, pemerintah-pemerintah ini telah meratifikasi instrumen internasional atas nama Negara untuk meningkatkan hak-hak penduduk. Karena hukum internasional lebih diutamakan daripada hukum nasional, otomatis bahwa ratifikasi instrumen internasional ini mengesampingkan pembuangan tanah secara sepihak oleh pemerintah di bawah pemahaman yang serakah tentang konsep "semua tanah menjadi milik Negara", tanpa persetujuan dari elemen utama suatu Negara (orang), yang kelangsungan hidup dan keberadaannya sehari-hari bergantung pada tanah.

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia & Masyarakat dan instrumen internasional lainnya menyatakan ilegal bagi pemerintah-pemerintah ini untuk secara sepihak menyerahkan tanah untuk tujuan pembangunan tanpa persetujuan masyarakat. Baru-baru ini, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mempertimbangkan perampasan tanah dan pelanggaran hak-hak masyarakat sebagai kejahatan yang meningkat ke tingkat yurisprudensi internasional dan berjanji untuk menuntut para pelanggar (pemerintah dan perusahaan).

Karena saya telah terlibat dalam gerakan dan organisasi hak-hak tanah masyarakat di Kamerun dan negara-negara lain, tidak ada satu komunitas pun yang saya temui yang menerima gagasan bahwa tanah itu milik pemerintah. Mereka mengatakan dengan tegas bahwa tanah itu milik komunitas mereka dan merupakan warisan leluhur. Tak satu pun dari komunitas tempat saya bekerja setuju dengan kehadiran perusahaan multinasional di tanah mereka, mengklaim bahwa perusahaan didirikan melalui penggunaan kekuatan paksaan.

Dalam pengalaman Anda, apa aspek / strategi penting untuk membangun dan memperkuat gerakan dan perjuangan masyarakat dalam konteks Afrika?

Gerakan dan perjuangan masyarakat di Afrika masih dalam tahap awal karena sejarah kelam perbudakan Afrika, kolonisasi paksa dan administrasi semi-kolonial pasca kemerdekaan, tanpa peluang demokrasi dan hak asasi manusia. Saat ini situasinya terlihat sangat berbeda disebabkan oleh demokrasi parsial dan penggunaan hak asasi manusia secara bebas terutama karena persyaratan yang diberikan oleh negara-negara industri.

Aspek terpenting dalam membangun gerakan kuat di Afrika adalah menaklukkan rasa takut dan ketidaktahuan yang secara sengaja ditanamkan oleh pemerintahan kolonial dan pasca-kolonial. Identifikasi terhadap kepedulian masyarakat juga penting saat membuat manual kesadaran dan edukasi yang mencerminkan masalah tersebut. Aspek penting lainnya adalah untuk memperkuat kapasitas aktivis masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk mengetahui hak-hak mereka dan untuk mengetahui bagaimana mempertahankan mereka sejalan dengan mata pencaharian sehari-hari mereka. Mengingat bahwa gerakan jangka panjang adalah gerakan yang dibangun dari bawah atau akar rumput dan bukan dari luar, resistensi yang kuat akan mengakar jika melekat kepada keprihatinan masyarakat.

Strategi ke depan meliputi: membangun koalisi yang kuat dari organisasi masyarakat sipil dan komunitas Afrika dengan tujuan untuk sering berbagi pengalaman dan informasi; merencanakan dan melaksanakan kegiatan seputar hak tanah masyarakat; mendukung advokasi berdasarkan pembelaan dan penanganan pelanggaran; menyediakan bentuk-bentuk materi pendidikan lainnya untuk masyarakat; dan menyederhanakan manual dan video informatif yang mengungkap

strategi dan taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusup dan merebut tanah leluhur masyarakat.

Dan apakah tantangan terbesarnya?

Dalam konteks Afrika, ada banyak tantangan yang membutuhkan pendekatan berbeda agar gerakan perlawanan bisa berhasil. Yang penting adalah ketidaktahuan masyarakat tentang hak tanah mereka dan tentang bagaimana mempertahankan tanah leluhur mereka, yang diduga karena ketidakmampuan mereka untuk menghadapi meningkatnya kekuatan perampasan tanah konspirasi yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah. Tantangan lain adalah tata kelola yang buruk yang ditandai dengan korupsi endemik dan kemiskinan yang dirancang untuk membuat masyarakat kembali tunduk pada kehendak pemerintah. Ada juga hambatan politik yang dibuat oleh pemerintah untuk memperkecil ruang LSM, organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial, melalui intimidasi dan kriminalisasi. Kondisi sulit dan peluang pendanaan yang terbatas adalah tantangan lain yang harus dihadapi gerakan.

Menurut Anda, apakah Anda berpikir bahwa solidaritas internasional penting untuk perjuangan masyarakat?

Solidaritas internasional tetap menjadi satu-satunya pilihan terbaik untuk menghentikan pengambilalihan tanah komunitas yang tidak masuk akal dan tidak berperasaan. Adalah penting untuk mengurangi pengaruh korporasi dan pemerintah dalam mengeksploitasi ketidaktahuan masyarakat dan dari mengambil paksa tanah ulayat.

Mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang hak akan diterjemahkan dengan mudah dengan adanya resistensi yang lebih kuat terhadap pencurian tanah. Pencerahan melalui berbagi pengetahuan di akar rumput, di mana pelanggaran terjadi dan di negara-negara di mana keuangan dan konsumen berasal merupakan langkah pertama yang penting.

Kelompok-kelompok lokal mungkin tidak dapat menangani sendiri intimidasi, kekerasan dan kasus-kasus hukum yang berkepanjangan yang diajukan kepada mereka oleh pemerintah dan perusahaan. Mereka tidak memiliki banyak pengalaman

tentang aksi langsung tanpa kekerasan yaitu dengan memiliki informasi dan intelijen yang tepat untuk menghadapi para pelanggar.

Jenis solidaritas internasional mana yang menurut Anda paling berhasil hingga sekarang?

Sampai sekarang, dalam konteks Afrika, yang saya pikirkan adalah kampanye di Kamerun melawan Herakles Farms, sebuah perusahaan berbasis di AS yang bermaksud menebang 73.000 hektar hutan asli untuk proyek perkebunan kelapa sawitnya di tengah-tengah empat kawasan lindung, termasuk Taman Nasional Korup. Serangan balik terhadap Herakles Farms berasal dari komunitas lokal, LSM lokal dan internasional, peneliti, ilmuwan, akademisi, dan lainnya. Tekanan besar memuncak di kedua, tingkat lokal, di mana operasi berlangsung, dan bahkan di tingkat internasional, di mana perusahaan tersebut mencari sumber dana untuk membangun proyek. Pada 2013, presiden Kamerun menandatangani serangkaian keputusan yang mengurangi konsesi dari 73.000 hektar menjadi 19.843 hektar. Namun ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga mereka terus melanjutkan perlawanan mereka dan menggemakan permintaan mendasar yaitu "Tidak ada Perkebunan Di Tanah Kami". Perusahaan tersebut pun meninggalkan operasinya di daerah konsesi Mundemba dan Toko pada tahun 2015.

Selain itu, inisiatif kolaboratif antarbenua seperti yang melibatkan GRAIN / WRM dan LSM lokal dan organisasi masyarakat di Afrika di bawah bimbingan Aliansi Menentang Pengembangan Kelapa Sawit Industri di Afrika tengah dan barat (the Alliance Against Industrial Oil Palm Expansion across central and west Africa) , telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk membangkitkan masyarakat yang tertekan dengan memberikan visibilitas untuk perjuangan mereka, informasi dan bersama-sama mengidentifikasi peluang untuk menghentikan perkebunan kelapa sawit yang merusak melalui program pertukaran solidaritas masyarakat, termasuk lokakarya dan kunjungan kedesa untuk mendorong mereka untuk melawan perampasan tanah atas tanah mereka. Di samping itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk mengungkap strategi dan taktik yang digunakan oleh perusahaan multinasional yang merampas tanah masyarakat dan memperingatkan masyarakat yang sekarang terancam oleh perampasan tersebut.

Apakah ada jenis solidaritas berbeda yang Anda harapkan untuk memperkuat perlawanan terhadap perampasan tanah di Kamerun atau di tempat lain di Afrika?

Memperkuat solidaritas masyarakat dan pertukaran antar desa yang secara langsung dan tidak langsung yang dipengaruhi oleh proyek-proyek pembangunan untuk membangun kepercayaan di tingkat masyarakat adalah tulang punggung dari setiap perlawanan yang sukses. Poin-poin penting lainnya adalah: pertukaran antarbenua dengan komunitas yang berbeda untuk berbagi pengalaman, yang membantu menghilangkan dan mengungkap penipuan dan taktik perusahaan; kunjungan desa yang koheren untuk menjaga desa-desa yang terkena dampak dan desa-desa yang akan terkena dampak waspada terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit dan proyek-proyek lain yang salah tanpa persetujuan mereka; paparan yang lebih kuat dari penipuan dan klaim perusahaan tentang pembangunan berkelanjutan dan bagaimana mereka dipatok oleh perusahaan alih-alih menghormati hak masyarakat atas Kesepakatan yang Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan.

Kita perlu menyelaraskan resistensi komunitas lokal dengan peluang alternatif komunitas lokal secara keseluruhan. Berinvestasilah pada pengembangan kapasitas organisasi dan komunitas lokal untuk menerapkan “Perlawanan Masyarakat yang Andal” yang mampu mencegah perampasan tanah dan hak asasi manusia di benua ini saat hal itu terjadi. Mengorganisir serangkaian acara seperti lokakarya, seminar, kunjungan desa, pertemuan langsung dan tidak langsung di antara para pemain kunci.

Ada kebutuhan utama untuk membangun kemitraan kolaboratif yang lebih kuat antara LSM di Afrika Utara dengan masyarakat dan mitra di Afrika Selatan untuk mengatasi perampasan tanah dan deforestasi, karena usaha ini didorong dan dikurangi oleh investor dan kebijakan pemerintah termasuk pilihan konsumen di negara-negara utara. Pertukaran pertemuan antara komunitas dari Utara dan Selatan akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keputusan politik, pemerintah dan perusahaan mempengaruhi lingkungan dan menyalahgunakan hak asasi manusia di Selatan, terutama karena perusahaan membombardir dengan komunikasi dan iklan yang menipu untuk menutupi masalah

perusakan dan pelanggaran, terkait dengan produk yang mereka klaim berkelanjutan.

Bangkit untuk Hak Berani Mengatakan TIDAK: Pengadilan Permanen Masyarakat Afrika Selatan

Pengadilan Permanen Pegawai Afrika Selatan melawan Perusahaan Transnasional ((The Southern African Peoples Permanent Tribunal on transnasional corporations) telah menjadi alat penting bagi masyarakat untuk berbagi tentang perjuangan mereka dan membangun solidaritas serta untuk menantang status quo dengan bangkit untuk mengatakan TIDAK kepada kekuatan perusahaan, impunitas negara dan agenda pembangunan yang merusak.

“Kami tidak mau penambangan. Kami tidak menginginkan anak-anak nya. Kami tidak mau neneknya. Kami tidak mau keluarganya. Kami tidak memiliki keinginan untuk mengobrol atau melakukan percakapan dengan orang-orang di tambang. ”

Kata-kata yang kuat ini diucapkan oleh dua perwakilan Komite Krisis Amadiba di Pengadilan Permanen Masyarakat Afrika Selatan Ketiga tentang Perusahaan Transnasional, yang diadakan pada bulan November 2018. Komite Krisis Amadiba mewakili komunitas Xolobeni, yang telah berjuang selama enam belas tahun untuk mencegah Konglomerat pertambangan Australia, Transworld Energy and Minerals (TEM), dari penambangan pasir yang kaya titanium di sepanjang Pantai Liar Afrika Selatan (Wild Coast of South Africa). (1) Bagi Komite Krisis Amadiba, tanah adalah bagian intrinsik dari identitas komunitas di masa lalu, sekarang dan masa depan. Nonhle Mbuthuma, anggota pendiri kelompok ini mengatakan, **“Kami yakin bahwa kami tahu siapa kami karena tanah itu. Kami percaya bahwa saat Anda kehilangan tanah, Anda telah kehilangan identitas Anda. ”**

Pada bulan April 2018, Komite membawa kasus mereka ke Pengadilan Tinggi Afrika Selatan dalam upaya mendorong keadilan. (2) Sekarang, berbulan-bulan kemudian dan hanya lebih dari satu minggu setelah Pengadilan Rakyat, **pengadilan telah memutuskan untuk bersama mendukung masyarakat, dan menyatakan bahwa Departemen Sumber Daya Mineral harus mendapatkan persetujuan "penuh dan resmi" dari masyarakat Xolobeni sebelum memberikan izin penambangan.**

Di seluruh Afrika Selatan, dan jauh melampaui wilayah ini, perjuangan Xolobeni telah menjadi simbol kasus bagi masyarakat yang menolak agenda pembangunan yang didorong oleh kegiatan ekstraktif dan memperjuangkan hak untuk mengatakan TIDAK. Kemenangan atas tanah ini telah menggembelng komunitas-komunitas di seluruh benua, dan menjadi suatu pengingat bahwa keadilan dimungkinkan melalui pengorganisasian yang berkelanjutan, pembangunan gerakan dan solidaritas.

Semangat solidaritas dan perlawanan berani terhadap kekuatan korporasi inilah yang mendorong sidang ketiga Pengadilan Permanen Masyarakat Afrika Selatan melawan Perusahaan-Perusahaan Transnasional. (3) Ini adalah yang terakhir dari proses dengar pendapat selama tiga tahun di mana masyarakat telah mengajukan kasus-kasus terhadap perusahaan transnasional, mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dan hak kolektif mereka serta eksploitasi berlebihan yang tidak terkendali dan perusakan wilayah. Perusahaan, dalam persekongkolan dengan Negara dan Lembaga Keuangan Internasional, seperti Bank Dunia, yang menyebarkan agenda pembangunan ekstraktif yang menghancurkan yang memprioritaskan keuntungan di atas manusia dan planet ini — semua atas nama "kemajuan."

"Kami telah dikejutkan oleh sejauh mana ekstraksi kejam, perampasan, pemindahan dan kebrutalan yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional untuk meraup keuntungan," demikian bunyi pernyataan penutupan para Juri di akhir pengadilan tiga hari tersebut. "Semua ini telah sering dilakukan dengan persekongkolan Negara, yaitu para oknum dan perusahaan-perusahaan dalam melakukan penindasan dan dalam beberapa kasus bahkan pembantaian terhadap warga."

Sepanjang proses pengadilan, masyarakat telah mengajukan total dua puluh kasus terhadap TNC di Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Zambia dan Zimbabwe. Kasus-kasus ini berkisar dari perusahaan pertambangan dan bendungan besar hingga agribisnis besar dan perampasan tanah - dan masing-masing berbicara tentang keterlibatan antara perusahaan, pemerintah dan lembaga keuangan dalam menegakkan sistem impunitas global. ([Baca tentang kasus di sini](#) [Read about the cases here](#)).

Memerangi mega-bendungan: Stop Inga 3!

Salah satu kasus yang dihadirkan di Pengadilan Tribunal adalah masyarakat yang menentang proyek bendungan PLTA Grand Inga di Republik Demokratik Kongo (DRC). (4) Dengan janjinya untuk "memberi energi dan membuka industrialisasi regional" dengan cara mengalirkan listrik di DRC dan benua Afrika, Skema Bendungan PLTA Inga (Inga 1 dan 2) telah menggusur komunitas di DRC. Jika Inga 3 berjalan sesuai rencana, sekitar lebih dari 37.000 orang yang mata pencahariannya berbasis di sekitar Sungai Kongo akan mengalami nasib yang sama.

Perusahaan pertambangan paling diuntungkan oleh listrik bertenaga air yang dihasilkan oleh dua proyek Inga pertama, meninggalkan banyak komunitas tanpa pasokan energi memadai. Saat ini, 85% populasi di DRC tidak memiliki akses listrik. (5) Rencana Sumber Daya Terpadu Afrika Selatan yang baru-baru ini diluncurkan sedang bergerak maju dengan kesepakatan DRC-Afrika Selatan yang akan menjamin 2500 MW listrik pada tahun 2030. (6) Sementara itu, **orang-orang yang paling terkena dampak langsung oleh proyek besar ini tidak akan menuai manfaat listrik tersebut karena listrik yang dihasilkan akan dikirimkan ke enam negara untuk menyalakan pertambangan dan industri ekstraktif lainnya di Afrika Selatan.** "Kami tidur di situs bendungan Inga tetapi kami hidup dalam kegelapan," kata Jane *, seorang pemimpin aktivis perempuan Kongo yang berbicara di Pengadilan Rakyat.

Di Tribunal, para aktivis juga menekankan beban khusus yang ditanggung perempuan ketika datang ke mega proyek seperti Inga yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian. Seorang aktivis perempuan menyatakan: "Kehidupan kami bergantung pada pertanian - bagaimana kami akan memberi makan diri sendiri? Bagaimana kami akan memberi makan anak-anak kami? Bagaimana kami akan bertahan? Kami, para wanita yang tinggal di Inga, bergantung pada pertanian - itulah yang memungkinkan kami memberi makan anak-anak kami. Kami sekarang terancam kekeringan karena bendungan. Produksi makanan kami berkurang karena infrastruktur yang dibangun. Suamiku harus pergi ke desa tetangga untuk berburu karena di sini binatang sudah mulai menghilang. Kami yang tinggal dekat dengan bendungan, kami bahkan tidak memiliki listrik. "

Komunitas yang berperang melawan bendungan Inga 3 telah bergabung dengan negara-negara lain yang terlibat kemudian menulis surat kepada pemerintah Afrika Selatan. Mereka juga telah meluncurkan kampanye untuk Menghentikan Inga 3 (tandatangani petisi untuk dukungan dan solidaritas [sign the petition in support and solidarity](#)). Mereka menuntut penarikan perusahaan-perusahaan Cina, Spanyol dan Afrika Selatan serta keterlibatan negara dalam skema tersebut. **Perlawanan mereka menginspirasi. Mereka bekerja dalam konteks yang semakin represif untuk memperjuangkan hak untuk Mengatakan TIDAK serta meminta kompensasi bagi mereka yang terlantar akibat bendungan Inga 1 dan 2.**

Komunitas-komunitas dari Afrika Selatan sudah mulai menanggapi permintaan mereka, dan melihat peluang yang jelas untuk strategi bersama dan solidaritas dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah Afrika Selatan. "Sungai Kongo adalah milik rakyat tetapi sudah diambil paksa dari mereka. Masyarakat tidak pernah diajak berkonsultasi. Kami, di Afrika Selatan, tidak pernah diberi tahu bahwa kami akan mendapatkan listrik dari DRC. Dan bahkan jika kami akan mendapatkannya sebagai masyarakat, kami tidak dapat menikmatinya karena mengetahui adanya kekerasan, militerisasi dan kehancuran yang terjadi di DRC," kata Caroline Ntaopane dari jaringan Wanita Afrika terhadap ekstraksi sumber daya destruktif (Aliansi WoMin)

Tribunal Rakyat telah menjadi platform penting bagi komunitas di sekitar wilayah Afrika selatan untuk berbagi perjuangan dan membangun solidaritas, menghadirkan kasus-kasus kritis pelanggaran perusahaan, dan menantang status quo dengan menyingkap rencana tersembunyi yang brutal dan tidak berkelanjutan dari apa yang disebut "pembangunan".

Komunitas-komunitas tersebut dan banyak lagi, saat ini bekerja bersama untuk membangun kampanye untuk *Hak Mengatakan Tidak*. Kampanye ini adalah "sebuah mobilisasi luas dan konvergensi aktivisme dan solidaritas transnasional." Ini didasarkan pada prinsip-prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dan dibangun di atas pengorganisasian dinamis dari gerakan, serikat pekerja, organisasi wanita dan banyak lainnya dalam komunitas seperti Xolobeni di Afrika Selatan dan Inga di DRC, yang bangkit untuk mengatakan TIDAK kepada kekuatan

perusahaan, impunitas negara, dan agenda pembangunan yang membahayakan masyarakat dan planet bumi..

Maggie Mapondera

WoMin African Alliance, <http://www.womin.org.za/>

** Untuk alasan keamanan, nama pemimpin aktivis telah diubah*

- (1) CIDSE, [Xolobeni Community and the Struggle for Consent](#), November 2017
- (2) The Guardian, [South African community wins court battle over mining rights](#), November 2018
- (3) <https://www.stopcorporateimpunity.org/permanent-peoples-tribunal-transnational-southern-africa/>
- (4) Daily Maverick, [SA does not need the Grand Inga Project](#), November 2018
- (5) [No to Inga 3, Yes to accessible energy across Congo](#)
- (6) [South African government releases Integrated Resource Plan draft](#), August 2018

Tanzania: Perlawanan Masyarakat terhadap Perkebunan Pohon Monokultur

Pada pandangan pertama, desa Nzivi terlihat desa seperti banyak desa lainnya. Tetapi perbedaan besar adalah bahwa desa ini dengan tegas tidak memperbolehkan investor-investor untuk kegiatan skala besar, seperti perkebunan pohon monokultur. Green Resources adalah perusahaan perkebunan swasta utama yang aktif di Tanzania.

Pada pandangan pertama, desa Nzivi adalah desa seperti banyak desa lainnya. Tetapi perbedaan besar adalah bahwa desa ini tidak memperbolehkan investor untuk kegiatan skala besar, seperti perkebunan pohon monokultur. Green Resources adalah perusahaan perkebunan swasta utama yang aktif di Tanzania.

Pada pandangan pertama, desa Nzivi, di wilayah Iringa di Tanzania, adalah desa seperti banyak desa lainnya di daerah tersebut. Penduduknya hidup dari pertanian dan peternakan, dua kegiatan utama yang dipraktikkan masyarakat di daerah tersebut. Tetapi siapa pun yang mengunjungi desa akan terkagum-kagum dengan luasnya perkebunan pohon monokultur di sekitarnya yang berisikan pohon pinus dan juga pohon eucalyptus. Secara keseluruhan pohon-pohon ini mungkin adalah perkebunan terbesar di Afrika Timur. Pada tahun 2016, Tanzania memiliki 583 ribu hektar yang ditanami oleh perkebunan pohon monokultur, dimana lebih dari 400 ribu hektar, sekitar 70 persen, terletak di daerah Iringa dan Njombe, yang disebut Dataran Tinggi Selatan.

Tetapi siapa pun yang akan berbincang dengan penduduk desa Nzivi akan menemukan bahwa itu berbeda setidaknya dalam dua aspek: **mereka memutuskan, setelah belajar dari pengalaman, untuk tidak mengizinkan investor untuk kegiatan skala besar, seperti perkebunan pohon monokultur. Dan sebagai hasilnya, Desa Nzivi masih memiliki banyak tanah untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.**

Untuk memahami apa yang membuat penduduk desa Nzivi membuat keputusan seperti itu, penting bagi kita untuk memahami dampak dari penanaman pohon industri pada komunitas lain di daerah tersebut. Selama kunjungan lapangan pada Oktober 2018, Yayasan SUHODE, Justiça Ambiental dan WRM mengunjungi, selain Nzivi, desa-desa Idete, Mapanda, Kihanga, Igowole dan Taweta, dalam menghadapi perkebunan monokultur yang dioperasikan oleh perusahaan swasta utama yang aktif di daerah tersebut, Sumber Daya Hijau, untuk mempelajari tentang dampak ini.

Green Resources di Tanzania

Perkebunan mulai didirikan di wilayah ini beberapa dasawarsa yang lalu, pertama oleh perusahaan negara seperti Sao Hill dan kemudian, sejak 1990-an, area perkebunan juga semakin dipromosikan dan didirikan oleh perusahaan swasta. **Perusahaan swasta terbesar di negara ini adalah Green Resources, sebuah perusahaan Norwegia yang mayoritas dimiliki oleh Norfund, lembaga pengembangan pemerintah Norwegia,** selain sejumlah besar investor pasar keuangan lainnya. (1)

Perusahaan Green Resources menggambarkan dirinya sebagai salah satu pengembang 'hutan' dan perusahaan pemrosesan kayu terbesar di Afrika Timur, **dengan perkebunan pohon di Mozambik, Uganda dan Tanzania.** Di Tanzania, Sumber Daya Hijau menguasai total area 74.850 hektar, dimana 17.000 hektar telah ditanami dengan kayu putih dan perkebunan pinus. Perusahaan menegaskan di situs webnya "bahwa penghijauan adalah salah satu cara paling efisien untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah pedesaan dan bertujuan untuk menjadi pemberi kerja dan mitra yang disukai bagi masyarakat lokal di daerah-daerah ini." Ia juga menyatakan bahwa untuk Tanzania "Area tanah yang

digunakan untuk penanaman adalah padang rumput bernilai rendah yang hampir seluruhnya diperoleh dari desa-desa setempat."

Berlawanan dengan situasi saat ini di Mozambik di mana perusahaan ini kehilangan sertifikat, di Tanzania, perusahaan tersebut memiliki sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council), yang memungkinkannya untuk mengklaim bahwa kayunya berasal dari sumber yang 'berkelanjutan'. Perusahaan ini juga telah mendaftarkan dan memvalidasi perkebunannya sebagai penyimpan karbon (melalui sistem VCS), dan bahkan di bawah skema CCBS yang, antara lain, mengklaim "misinya" adalah "untuk merangsang dan mempromosikan kegiatan pengelolaan lahan yang dipercaya dapat memitigasi perubahan iklim global, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan masyarakat lokal, dan melestarikan keanekaragaman hayati."⁽²⁾

Green Resources datang komunitas Idete pada tahun 1996, Mapanda pada tahun 1997 dan Taweta pada tahun 2007. **Masyarakat tertarik dan memutuskan untuk menerima perjanjian sewa dengan perusahaan yang mengamankan akses hingga sepertiga dari tanah komunitas selama periode 99 tahun.** Perjanjian ini terjadi setidaknya karena dua alasan penting. Pertama, karena pada saat itu, masyarakat tidak melihat kehilangan lahan sebagai hal yang krusial untuk kebutuhan mereka dan mereka tidak mengetahui nilai sebenarnya dari tanah tersebut. Tetapi juga, alasan yang sangat penting untuk menerima Green Resources adalah serangkaian janji-jani, diantaranya, sebagai awal, **pekerjaan bagi masyarakat, diikuti peningkatan infrastruktur desa**; misalnya, membangun dan merenovasi ruang kelas, kantor pemerintah daerah dan ruang pertemuan, apotik, sumber air, asrama staf kesehatan dan pendidikan, dll. Selain itu, **perusahaan juga berjanji untuk berbagi 10 persen dari pendapatan yang dihasilkan dari proyek karbon** yang diuraikan, yang didasarkan pada karbon yang 'tersimpan' di pohon pinus dan eucalyptus yang ditanam dan tumbuh di tiga desa. Green Resources meletakkan janji-janji ini di atas kertas dan menandatangani kontrak tambahan dengan masyarakat untuk pendapatan atas karbon, dentidak gan kondisi masyarakat yang memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja sistem pasar ini.

Saat ini, bertahun-tahun setelah kedatangan perusahaan ini, masyarakat kecewa dan marah. Mereka menegaskan bahwa janji-janji perusahaan tidak terpenuhi atau

hanya sebagian. Saat ini, hampir tidak ada pekerjaan permanen yang tersedia. **Baik di Idete dan Taweta, Green Resources hanya menciptakan 1 pekerjaan tetap, dan di Mapanda - mengingat jumlah 5.503 penduduknya menurut dewan desa - bahkan tidak ada satu pekerjaan pun.** Penduduk desa juga memiliki banyak keluhan tentang kondisi kerja, termasuk gaji yang rendah; kurangnya transportasi bagi mereka yang disewa untuk pekerjaan sementara; resiko bahaya atau bahkan kurangnya peralatan perlindungan terhadap agrotoksin; dan penduduk desa menuduh perusahaan karena tidak membayar ke sistem jaminan sosial Tanzania dari jumlah yang dipotong dari gaji mereka.

Warga desa mengakui bahwa beberapa janji infrastruktur telah dipenuhi. Tetapi pada saat yang sama, di Mapanda misalnya, penduduk desa masih menunggu ruang pertemuan desa yang baru. Hanya setelah komunitas memberi banyak tekanan, akhirnya perusahaan berjanji untuk membangunnya tahun ini. Namun demikian, sampai saat ini ruang pertemuan baru belum juga dibangun. Di Taweta, satu-satunya peningkatan yang diingat penduduk desa adalah renovasi dua ruang kelas. Kantor yang dibangun perusahaan Green Resources di desa ini untuk mengelola perkebunan di daerah tersebut telah ditutup dan terlihat ditinggalkan.

Pendapatan karbon hanya dibagi dengan desa Mapanda, di mana masyarakat menerima dua pembayaran karbon 30 dan 33 juta dalam mata uang shilling Tanzania, yang masing-masing dibayarkan pada tahun 2011 dan 2014. Kedua pembayaran ini berjumlah sekitar US \$ 40 ribu, jumlah yang sangat rendah untuk komunitas lebih dari 5 ribu orang dengan banyak tantangan infrastruktur, seperti, misalnya, untuk meningkatkan pasokan airnya. Meski begitu, **tidak ada transparansi dalam hal jumlah yang ditentukan untuk dibayarkan kepada masyarakat.** Masyarakat tidak mengetahui nilai total dari pendapatan yang diperoleh perusahaan atau apakah jumlah yang disalurkan benar-benar sesuai dengan 10 persen dari pendapatan atau tidak. Desa Idete dan Taweta bahkan belum menerima pembayaran karbon sampai sekarang. Dalam presentasi publik Green Resources yang tersedia di internet (3), perusahaan mengeluh bahwa "pendanaan karbon telah mengecewakan", tetapi menyatakan bahwa "Sumber Daya Hijau telah menghasilkan USD 2 juta (...)". Jika dihitung, 10 persen dari jumlah itu, desa-desa seharusnya menerima setidaknya US \$ 200 ribu - jauh lebih banyak dari yang diterima desa Mapanga.

Tiga komunitas yang kami kunjungi menyesal mereka memberikan jejak tanah yang sangat luas kepada perusahaan dan bahwa akses mereka sekarang dibatasi, termasuk untuk mengumpulkan jerami dan tanah liat di daerah yang masih harus ditanami. Ketika ditanya apakah mereka setuju dengan argumen perusahaan bahwa tanah ini 'bernilai rendah' atau 'terdegradasi' (seperti yang diklaim oleh Green Resources dan perusahaan perkebunan pohon lainnya), mereka mengatakan dengan suara bulat bahwa itu adalah kebohongan. Mereka menganggap tanah itu sangat berharga, subur dan penting bagi masyarakat dan masa depan mereka. **Saat ini mereka perlu meminta izin jika mereka ingin memasuki tanah.** Di Idete, penduduk desa khawatir bahwa mereka tidak dapat lagi mengumpulkan sejenis buluh yang digunakan untuk membuat keranjang tradisional, yang terutama diproduksi oleh para perempuan. **Seorang wanita desa juga prihatin dengan meningkatnya kasus HIV / AIDS karena meningkatnya pekerja luar di wilayah desa.**

Penduduk desa lainnya berpendapat bahwa antara kerugian yang diderita masyarakat dengan membagikan tanah mereka selama 99 tahun tidak sebanding dengan dengan manfaat yang diperoleh sampai sekarang. Desa-desa ini khawatir tentang masa depan mereka. Seorang wanita di desa Idete mencerminkan dengan keprihatinan yang tinggi tentang bagaimana anak-anaknya mungkin masih bisa bertani, **tetapi cucu-cucunya tidak akan memiliki ruang untuk tanaman pangan dan ternak mereka, yang berarti kemiskinan akan meningkat.**

Tidak mengherankan bahwa ketiga komunitas menginginkan tanah yang sekarang ditempati oleh Green Resources kembali atau setidaknya sebagian darinya. Dengan merefleksikan masa depan desa dan keluarga mereka, mereka ingin memastikan bahwa mereka akan memiliki cukup tanah untuk ribuan penduduk desa di komunitas mereka, terutama dalam waktu dekat. Namun mereka menghadapi tantangan besar dengan sebuah kontrak yang tampaknya sah di mana mereka setuju untuk menyewakan tanah desa mereka kepada perusahaan. **Tetapi apa legitimasi dari kontrak seperti itu ketika disetujui berdasarkan daftar janji yang tidak terpenuhi dan ketika aktivitas perusahaan membahayakan masa depan seluruh masyarakat?**

Temuan-temuan yang ditemukan di lapangan mempertanyakan tentang kebenaran pernyataan perusahaan ketika mencatat bahwa di Tanzania perusahaan mengklaim beroperasi secara teladan dan merupakan mitra pilihan masyarakat lokal di daerah tersebut.

Informasi sebagai kekuatan

Kisah Green Resources di Tanzania sekali lagi menunjukkan bagaimana **perusahaan perkebunan selalu perlu mengamankan akses ke area lahan yang luas untuk dapat beroperasi. Ini juga menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan ini melakukan ini berdasarkan sejumlah janji atau t tidak dipenuhi untuk meyakinkan masyarakat yang terkena dampak untuk memberikan tanah mereka.** Cerita dan pengalaman dari masyarakat yang berhadapan dengan Green Resources atau perusahaan perkebunan lainnya sangat penting untuk dikaji dan dipelajari oleh desa lain.

Penduduk desa Nzivi mengetahui hal ini tepat waktu tentang pengalaman dari desa-desa lain dengan berbicara dengan komunitas tetangga mereka, dan, khawatir bahwa mereka mungkin akan menghadapi situasi yang sama, mereka memutuskan untuk tidak mempercayai janji-janji itu dan mengatakan tidak kepada perusahaan mana pun yang ingin untuk mengendalikan bidang tanah mereka yang signifikan, seperti Green Resources. Mereka memutuskan untuk mengamankan dan mengendalikan sendiri akses ke tanah mereka untuk generasi mendatang.

Ini tidak berarti bahwa penduduk desa Nzivi tidak akan menerima investasi sama sekali. Para pemimpin mengatakan kepada kami bahwa mereka memisahkan area yang relatif kecil dari tanah komunitas untuk investor, tetapi hanya untuk mereka yang tidak bertujuan untuk mengambil alih bagian signifikan dari tanah mereka dan juga tertarik untuk mendukung komunitas dalam layanan yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka melihat bahwa jenis investasi yang berbeda ini dapat menguntungkan mereka dan pada saat yang sama mengamankan hak fundamental mereka untuk mengakses tanah, hutan dan padang rumput mereka sendiri, yang mereka andalkan untuk bertahan hidup.

Tidak mengherankan, belum ada investor yang muncul untuk mengajukan proposal kepada masyarakat. Ini menggambarkan seberapa jauh kepentingan berorientasi

keuntungan dari investor seperti Green Resources dan investor swasta dan Norwegia di belakangnya dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat pedesaan di Tanzania, seperti Nzivi.

*Justiça Ambiental! – Mozambique,
SUHODE Foundation – Tanzania
dan WRM*

1. <http://www.suaire.suanet.ac.tz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1659/SAID%20ASIAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
2. <http://www.greenresources.no> and <http://www.climate-standards.org/about-ccba/>
3. [http://www.greenresources.no/Portals/0/pdf/GR_NewForest_for_Africa_170316_\(new\).compressed.pdf](http://www.greenresources.no/Portals/0/pdf/GR_NewForest_for_Africa_170316_(new).compressed.pdf)

Articles of the Bulletin can be reproduced and disseminated using the following source: **Bulletin 241 of the World Rainforest Movement (WRM): "Voices from the Ground: Communities in Movement and Resistance Strategies"** (<https://wrm.org.uy/>)

Subscribe to WRM bulletin here: <http://eepurl.com/8YPw5>

The Bulletin aims to support and contribute to the struggle of Indigenous Peoples and traditional communities over their forests and territories. Subscription is free.

Bulletin of the World Rainforest Movement (WRM)

This Bulletin is also available in French, Spanish and Portuguese

Editor-in-Chief: Winfridus Overbeek

Managing Editor: Joanna Cabello

Editorial Assistants: Elizabeth Díaz, Lucía Guadagno, Jutta Kill, Carolina Motoki y Teresa Pérez

WRM International Secretariat

Avenida General María Paz 1615 office 3. CP 11400. Montevideo, Uruguay

Phone/Fax: +598 26056943

wrm@wrm.org.uy | <http://www.wrm.org.uy>